GERAKAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT NICCOLO MACHIAVELLI

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

OLEH :

AHMAD FARUK

NIM : E01215002

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ahmad Faruk

NIM : E01215002

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Januari 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

D15AHF241943760

6000

ENAM RIBU RUPIAH

AHMAD FARUK

NIM. E01215002

Scanned with CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia Dalam persoektif Filsafat Politik Niccolo Machiavelli" yang ditulis oleh Ahmad Faruk ini telah disetujui pada tanggal 9 Januari 2020

Surabaya, 9 Januari 2020

Pembimbing I

Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP: 196909071994032001

Pembimbing II

Dr. H. Ainur Rofiq al-Amin, M.Ag
NIP: 197206252005011007

Scanned with CamScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia Dalam perspektif Filsafat Politik Niccolo machiavelli" yang ditulis oleh Ahmad Faruk ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 13 Januari 2020

Tim Penguji

1. Dr.Hj. Aniek Nurhayati, M.Si :.....

2. Dr.H. Ainur Rofiq al-Amin, M.Ag :.....

3. Dr.Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I :.....

4. Dr. Rofhani, M.Ag :.....

Surabaya, 13 Januari 2020

Dekan,

Dr.H. Kunawi, M.Ag

NIP 196409181992031002

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Faruk
NIM : E01215002
Fakultas/Jurusan : Ushouddin dan Filsafat
E-mail address : Farukachg@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam Perspektif Filsafat Politik Niccolo Machiavelli

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12.3.2020.

Penulis

(Ahmad Faruk)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul :"Garakan Politik Hizbut Tahrir dalam Perspektif Filsafat Politik Niccolo Machiavelli"

Penulis : Ahmad Faruk

Key Word : Politik Ketakutan, Machiavelli, HTI

Skripsi ini meneliti gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam perspektif filsafat politik Niccolo Machiavelli. Gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia merupakan gerakan politik yang berideologi Islam. Gerakan politiknya yaitu ingin menegakkan kembali khilafah islamiah. Oleh karena itu ciri-ciri gerakan HTI selalu bernuansa Islam dan berpatokan pada Alquran dan sunnah. Mereka melihat realitas politik Indonesia yang plural dan liberal, yang mengikuti sistem negara barat dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang jauh dari peradaban, karena tidak memakai sistem politik Islam. Maka dari itu mereka selalu merespon isu-isu politik di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, mereka tidak segan melakukan segala cara untuk mengkritik sistem pemerintah Indonesia. Tujuan skripsi ini ingin menjawab sebuah pertanyaan bagaimana gerakan politik Hizbut Tahrir di Indonesia dengan analisis menggunakan filsafat politik Niccolo Machiavelli. Skripsi ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan logika berfikir induktif. Dalam perspektif ini, penulis memeriksa gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai menggunakan politik bebas nilai. konsep inilah yang mendukung terjadinya gerakan-gerakan yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Hasil analisis riset penelitian ini menegaskan bahwa terjadi ketakutan dan kekhawatiran terhadap warga negara, mengancam persatuan, dan kelangsungan hidup sebagai bangsa dan negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....iv
MOTTO.....v
ABSTRAK.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Manfaat Penelitian.....8
E. Tinjauan Pustaka.....9
F. Metode Penelitian.....12
G. Sistematika Pembahasan.....16

BAB II : FILSAFAT POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI
A. Biografi Niccolo Machiavelli.....18
B. Pandangan Politik Machiavelli.....21

BAB III : GERAKAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA
A. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir.....35
B. Sejarah Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia.....37
C. Gerakan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia.....40

BAB IV: ANALISIS GERAKAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT NICCOLO MACHIAVELLI
A. Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia mengesampingkan moralitas dalam urusan politik.....50
B. Virtu dan Fortuna Versi Hizbut Tahrir Indonesia.....53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Politik Ketakutan Hizbut Tahrir Indonesia 55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hizbut Tahrir (HT) dibawa masuk ke Indonesia oleh Abdurrahman al-Baghdadi pada tahun 1983, sehingga organisasi ini lebih dikenal dengan sebutan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI berpusat di Bogor dan dipimpin oleh Muhammad al-Khattat yang merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor. HTI merupakan partai politik, akan tetapi organisasi ini tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam pemilu. Yang Menurutnya banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam.[1] HTI kemudian menjadi organisasi yang cukup besar setelah NU dan Muhammadiyah. Kelompok ini sangat menentang sistem demokrasi yang menurut mereka melahirkan banyak gejolak, seperti korupsi, ketidakadilan, dan dikuasainya kekayaan tanah air. Untuk itu organisasi ini mengusulkan sistem *khilafah* sebagai sistem negara, yang berasaskan nilai-nilai keislaman. Menurut mereka, timbulnya gejolak pada demokrasi akibat pengabaian nilai-nilai keislaman.

Jonkennedi mencatat bahwa jalan mewujudkan cita-cita HTI adalah penegakan *khilafah*. Negara yang dipimpin oleh *khalifah* yang dipilih secara demokratis dan yang menguasai ilmu keislaman.[2] Model tersebut mirip dengan masa kepemimpinan Nabi Saw dahulu. Meskipun seluruhnya tampak nuansa keislamannya, namun pemilihan pemimpin dengan cara yang demokratis.

---

[1] Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living Alquran Perspektif Komunikasi" *Episteme*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2017), 5.

[2] Jonkennedi, "Gerakan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia" *Jurnal Komunika*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2012), 03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemimpin menjalankan *kitabullah* dan sunah Rasulnya. Dari sini visi-misi HTI adalah pengambilan masa sekarang yang menurutnya keliru ke masa kejayaan Islam terdahulu.

Menurut Nilda Hayati, HTI berkembang lumayan pesat di seluruh dunia khususnya di Indonesia karena sistem *khilafah*-lah yang menarik. Sistem yang dulu pernah diterapkan Islam kuno, seperti Rasulullah, khalifah, dan *khulafaurrasyidin.*[3]Namun rata-rata HTI diterima oleh kelompok fundamentalis dan tidak bagi golongan moderat dan liberal.

Pendiri HT adalah Taqiyuddin an-Nabhani, dia meninggalkan beberapa konsep negara Islam kepada para pengikutnya.[4] Konsep tersebut adalah untuk menegakkan khilafah di negara yang penduduknya Muslim. Kenapa Taqiyuddin mengarahkan penolakan hegemoni Barat? Hal ini disebabkan karena ia lahir di lingkungan yang sedang di dominasi Barat (Inggris) secara ideologi, terutama dalam bidang politik dan pendidikan. Inilah Taqiyuddin keras dan cenderung melakukan perlawanan karena ia dibentuk dari lingkungannya sendiri. Pemahamannya tentang Islam mengarahkan pada perlawanan terhadap pengaruh dan dominasi Barat.[5]

Dari sejarah di beberapa negara Muslim yang didominasi Barat mulai menimbulkan kekhawatiran besar bagi umat Islam. Taqiyuddin an-Nabhani yang mendirikan *Hizbut Tahrir* dengan cita-cita penegakan negara *khilafah* yang

---

[3] Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah* (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), 23. Dikutip dari Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living Alquran Perspektif Komunikasi" *Episteme*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2017), 5.

[4] Jonkennedi, *Gerakan Hizbut*, 4.

[5] Mohammad Topan, "Kekuasaan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam Tinjauan Etika Politik" *Jurnal Filsafat*, Vol. 23, Nomor 2 (Agustus 2013), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbasis nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Alquran dan Sunah tidak lain adalah untuk mengatasi gejolak dan kemunduran Islam. *Khilafah* dipropagandakan sedemikian masif oleh *Hizbut Tahrir*, dan bisa dikatakan bahwa awal dan pangkal segala problem manusia karena tidak adanya *khilafah*, dan solusi seluruh problem manusia adalah tegaknya *khilafah*.[6] Menurut Mohammad Topan, saat HT mulai merambat di beberapa negara dengan penduduk mayoritas Muslim, konsep dan gerakan politik HT mulai diperhitungkan secara global, khususnya negara-negara sekuler yang sedang menduduki negara di mana HT itu berada. Artinya, HT menjadi tantangan ironis bagi Barat.[7]

Kekuasaan memang selalu menjadi rebutan di mana pun. Karena manusia memiliki hasrat hawa nafsu, jika nafsu itu tidak mengantarkan pada kebaikan, maka mengantarkan pada keburukan. Pada keburukan itulah perebutan kekuasaan menjadi buruk. Contoh kecilnya hasrat hegemoni Barat untuk menduduki dunia. Kekuasaan adalah upaya untuk mempengaruhi dan mengontrol dengan sepenuh hati dan dengan tujuan pribadinya. Gejala ini pasti ada didalam setiap masyarakat.[8]

Lalu apa tujuan besar HTI mendirikan *khilafah* sebagai sistem utama negara? Menurut catatan Johnkennedi ada tiga alasan besar atas pendirian *khilafah*. Pertama membangkitkan Islam dari kemerosotan. Kedua, bebas dari pemikiran-pemikiran dan sistem-sistem perundang-undangan yang tidak Islam.

---

[6] Ainur Rofiq Al Amin, "Kritik Pemikiran Khalifah Hizbut Tahrir Yang Autokratik", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2017), 434.
[7] Mohammad Topan, "Kekuasaan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam Tinjauan Etika Politik" *Jurnal Filsafat*, Vol. 23, Nomor 2 (Agustus 2013), 149.
[8] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, bebas terhadap pengaruh negara-negara sekuler.[9] HTI menganggap bahwa sesuatu yang tidak islami bukan pandangan kelompoknya. Artinya, seluruh pandangan HTI bernuansa keislaman. Karena ideologi HTI sendiri didasarkan pada Alquran dan Sunah tentu semua yang non islami akan ditolak.[10]

Hizbut Tahrir mulai dibawa masuk ke Indonesia oleh Abdurrahman al-Baghdadi pada tahun 1983. Ia adalah anggota *Hizbut Tahrir* di Yordania.[11]Pengaruh dan pandangannya tidak beda jauh dengan di pusat.[12] Oleh karena itu ciri-ciri gerakan politik HTI selalu bernuansa Islam dan berpatokan pada Alquran dan Sunah. Melihat realitas politik Indonesia yang plural dan liberal seperti politik-politik negara demokrasi lainnya, HTI dan partai umumnya memiliki sisi perbedaan yang sangat jauh.

Keduanya Jauh melintasi ideologi, tujuan, dan praktik. Sisi ideologi partai pada umumnya menjunjung nasionalisme, sekularisme, liberalisme dan persatuan perbedaan dari semua dimensi kemajemukan. Semua ini telah diterapkan hampir di seluruh negara di dunia, utamanya di Eropa. Sementara ideologi HTI adalah Islam dan berpatokan pada Alquran dan Sunah. Indonesia adalah negara bersistem demokrasi dengan kemajemukan yang luar biasa. Sedangkan Pancasila adalah ideologi persatuan atas kemajemukan. Di dalam negara berasaskan Pancasila, HTI—yang memiliki ideologi sendiri—tidak searah dan tentu menolak Pancasila sebagai ideologi negara karena tidak islami. Tidak diterapkannya syariat Islam—menurut HTI—adalah sumber masalah yang terjadi di Indonesia. Bagi

---

[9] Jonkennedi, *Gerakan Hizbut Tahrir*, 3.
[10] Ibid., 4.
[11] Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living Alquran Perspektif Komunikasi" *Episteme*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2017), 5.
[12] Jonkennedi, *Gerakan Hizbut Tahrir*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, pemerintah tidak mampu meredam masalah karena ideologi negara bukan syariat. Alasan-alasan ini kemudian menjadi cita-cita luhur HT dan HTI yang biasa kita kenal dengan negara khilafah.

Tidak beda jauh dari negara Iran, HTI di Indonesia muncul karena dinamika politik global yang ada di Indonesia dalam polanya yang hegemonik.[13] Pandangan ini berdasarkan pada penduduk mayoritas Islam di mana negara tersebut kehilangan nilai-nilai Islam. Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam tetap menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar bangsa dan demokrasi sebagai sistem bernegara. Untuk itu Indonesia berpandangan global terhadap liberalisme, sekularisme, dan hubungan dengan negara-negara lain. Tidak menjadikan Islam sebagai satu-satunya pijakan bernegara, tapi juga dari semua kemajemukan. Dengan ini, Indonesia, sebagai negara, lebih tampak sekuler dan liberal, serta mengambil esensi penting dari semua perbedaan.

Negara-negara Muslim banyak mengadopsi pola kehidupan masyarakat Barat dan mengadopsi sistem hukum yang tidak Islami.[14] Aspek ini dilihat oleh HTI sebagai masalah yang mengakibatkan perpecahan, problem negara, dan umat. Demokrasi dianggap pangkal keburukan. Dan antipati pada nasionalisme dan demokrasi. Salah satu alasannya karena bagi mereka demokrasi tidak bisa disandingkan dengan Islam. Ia kufur. Menurut HTI sendiri, agar konstelasi ini cepat selesai, Indonesia harus kembali pada Islam periode awal sebagaimana di masa-masa Nabi, khulafaur Rasyidin, *khilafah* pada masa dinasti Muawiyah dan

[13] Jonkennedi, *Gerakan Hizbut*, 3.
[14] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa Abbasiyah hingga sampai *khilafah* Turki Ustmani yang ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1924.[15]

HTI sangat menjunjung tinggi model kekhalifahan klasik sebagai satu-satunya bentuk autentik pemerintahan Islam, yang diupayakan untuk dihidupkan kembali bersama lembaga-lembaga yang menyertainya. Bahkan untuk mencapai tujuan ini, HTI menyusun konstitusi yang merinci sistem politik luar negeri, pendidikan, dan sosial bagi sistem *khilafah*.[16]

Bagaimana posisi HTI sebagai organisasi Islam di tengah organisasi lainnya? Mereka berseberangan ideologi sampai saat ini. Misalnya HTI, Muhammadiyah, dan NU, serta organisasi lainnya. Menurut catatan Nilda Hayati, dalam kategori keragaman, NU dan Muhammadiyah mendukung ide nasionalisme untuk merangkul seluruh embel-embel kebudayaan, tradisi, dan etnis. Sedangkan HTI merepresentasikan pergerakan *sentrifugalisme* Islam. Visi politiknya adalah menyatukan identitas-identitas Islam dan lokal yang berserak di seluruh dunia di bawah otoritas tunggal khilafah Islamiyah.[17] Menurut Masdar Hilmy, ideologi HTI adalah antitesis Pancasila dan negara-bangsa (NKRI).[18] Oleh karena itu HTI ingin mengganti undang-undang yang berlandaskan Pancasila ke syariat Islam.

---

[15] Ibid., 5.
[16] Dedy Slamet Riyadi, " Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir" (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008), 64.
[17] Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living Alquran Perspektif Komunikasi" *Episteme*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2017), 7.
[18] Masdar Hilmy, "Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 1 (September 2011), 1-2. Dikutip dari ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek keterangan di atas menegaskan bahwa mendirikan *khilafah* sama wajibnya dengan salat, puasa, zakat, haji, dan jihad.[19]

Fokus penulis adalah pada gerakan politik *Hizbut Tahrir* di Indonesia mulai dari gerakannya yang suka mengkafir-kafirkan umat Islam lain sampai dengan menyusup kepada organisasi lain untuk kemudian dicuci otaknya agar mempunyai kesadaran betapa pentingnya sistem khilafah ditengah-tengah sistem negara sekuler yang terjadi sekarang ini, dimana pemikirannya yang dinilai *autokratis* bagi sebagian penulis HTI membuat penulis merasa tertarik untuk menelitinya, dimana HTI sebagai objek material dan filsafat politik Niccolo Machiavelli sebagai objek formal penulis. Kita mengenal Nicolo Machiavelli yang menulis buku *the Prince*, dia mengulas tentang bagaimana mendapat dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara mulai dari berbohong, memfitnah, bahkan menghabisi lawan politiknya. Karya ini membongkar kedok betapa menggiurkannya kekuasaan bagi yang mencari atau mempertahankan kekuasaan agar tetap langgeng."

Bagaimanapun juga, aktivitas HTI tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 10 tahun dari awal masuknya. Hal ini disebabkan pada pemerintahan Soeharto gerakan-gerakan radikal yang tidak berideologi pancasila sangat dilarang. HTI memperoleh kebebasannya setelah terjadi reformasi, walaupun sekarang organisasi ini telah dibubarkan.[20]Namun dalam konteks Indonesia, politik HTI baru pada tingkatan moral yang dikampanyekan dalam berbagai kegiatan seperti jemaah tablig akbar, seminar, diskusi, rapat-rapat umum,

[19] Khilafah wajib dan Membawa Rahmat, dalam, Https://hisbut-tahrir.or.id/2014/10/21/. Diakses pada tanggal 06 Juni 2019.
[20] Nilda Hayati, *Konsep Khilafah*, 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan demonstrasi. Jadi HTI menggunakan jalan tersebut untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam.[21]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia?
2. Bagaimana gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam filsafat politik Niccolo Machiavelli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Menjelaskan bagaimana gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia
2. Menjelaskan bagaimana gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam filsafat politik Niccolo Machiavelli

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

   Jauh dari kata sempurna, maka jauh juga kegunaan dan dampak positif dari penelitian. Namun sebagai hasil penelitian, maka penulis sangat berharap karya ini—meski tidak banyak—bisa menyumbang terhadap teori-teori yang sudah ada dan lebih mumpuni. Setidaknya mahasiswa bisa mengambil nilai positif jika ada dan mengkritisi karya ini agar

[21] Jonkennedi, *Gerakan Hizbut*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya ada karya-karya besar dan agung yang berdampak besar terhadap keilmuan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini berguna bagi seluruh masyarakat dan bisa mengembangkan dan mempraktikkan hasil dari hasil penelitian ini. Selain itu juga bisa menjadi jembatan kecil bagi para mahasiswa untuk berpikir kritis menggunakan teori Niccolo Machiavelli terhadap persoalan-persoalan yang ada sekarang, utamanya terhadap gerakan politik Hizbut Tahrir.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji beberapa pembahasan yang berhubungan dengan tema ini. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menemukan beberapa referensi yang relevan dengan tema yang peneliti angkat, adapun beberapa kajian terdahulu diantaranya:

Nama	**Judul**	**Jenis**	**Publikasi**	**Temuan**
Ainur Rofiq Al Amin	Kritik Pemikiran Khalifah Hizbut Tahrir yang Auto-kratik	Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam	Desember 2017	Menjelaskan dan meng-kritik sistem politik Hizbut Tahrir, bahwa sistem khilafah adalah satu-satunya sistem yang dapat mengatasi semua problem atau masalah umat Islam modern saat ini.
Dedy Slamet Riyadi	Analisis terhadap konsep khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia	Skripsi	Juli 2008	Menjelaskan konsep khi-lafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik di Indonesia dan terhadap peta politik Islam kontemporer di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				Indonesia.
Jonkennedi	Gerakan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia	Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi	Juni 2012	Menjelaskan proses demokratisasi yang tidak hanya ditandai dengan munculnya partai politik baru, dan juga kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan keagamaan. Penelitian ini memaparkan bahwa Kelompok formulis berkepentingan mengaitkan Islam dan negara secara legal formal, sedangkan kelompok substansialis lebih mengedepankan substansi Islam dalam negara.
Masdar Hilmy	Akar-akar transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia	Islamica: Jurnal Study Keislaman	September 2011	Menjelaskan akar "transnasi-onal Islam" atau "Islam transnasional" di Indonesia.
Mohammad Topan	Kekuasaan Menurut Taqiyudin an-Nabhani dalam Tinjauan Etika Politik	Jurnal Filsafat	Agustus 2013	Menjelaskan dasar konsepsi legitimasi kekuasaan yang ditinjau dari segi teori etika politik, dan untuk mengetahui relevansinya bagi gerakan politik Hizbut tahrir di Indonesia.
Nilda Hayati	Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia	Epiteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman	Juni 2017	Menjeaskan bagaimana Hizbut Tahrir menyebar luaskan doktrin khilafahnya, organisasi tersebut menggunakan berbagai media komunikasi. Penelitian ini menjelaskan ayat al-Quran sebagai landasan konsep khilafah, dalam je-jaring komunikasi ditengah pergumulan media massa. Disini HTI berusaha menegakkan sistem negara khilafah sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				dengan syariah yang lengkap, yang kemudian mereka tuang-kan ke dalam media massa, Untuk kemudian di-komunikasikan kepada seluruh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat politik Machiavelli dengan mengkomparasikan objek material yaitu gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia, dimana sepengatahuan peneliti ketahui bahwa belum ada penelitian yang mengkomparasikan filsafat politik Machiavelli dengan gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Metode

Sebuah karya riset ilmiah yang dituntut untuk menghasilkan data objektif tentu harus memakai metodologi penelitian yang baik dan benar. Metodologi penelitian berfungsi sebagai penyusunan logika dalam mengambil sebuah kesimpulan. Sehingga penelitian diharapkan mampu menjaga objektivitas dan orisinalitas hasil penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian tidak bersifat asumsif tapi memuat data-data dan pengolahan yang dilakukan secara objektif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode berfikir induktif dengan berupaya mengumpulkan premis-premis berupa data parsial untuk kemudian dijadikan sebagai kesimpulan yang utuh.

a. Jenis penelitian

Penelitian adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif sebab penelitian ini lebih menekankan pada aspek makna dengan menganalisis data-data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkumpul baik berupa lisan maupun tertulis.[22] Penelitian kualitatif bermaksud untuk mendeskripsikan, memahami dan menganilisis sebuah fenomena, tindakan, perilaku dan lain-lain dengan cara eksplanasi dalam bentuk kata-kata atau bahasa.[23]

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan adalah *library research* sehingga data-data yang diambil bersumber dari, jurnal, artikel, skripsi, website dan data pendukung yang lain. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis (deskriptif-analisis) fenomena di lapangan secara mendalam dengan pengumpulan data melalui bentuk narasi dan tidak statistik.

b. Sumber data

Penulis mengumpulkan berbagai sumber yaitu berupa kajian terdahulu dengan objek kajian yang ada kaitannya dengan tema yang peneliti angkat serta referensi-referensi yang mengulas teori politik *realism*.

1). Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh melalui sumber utama secara langsung. Dalam hal ini sumber yang dimaksud meliputi, buku, jurnal dan skripsi.[24] Adapun temuan-temuan yang penulis temukan meliputi buku-buku karya asli Machiaveli yang membahas teori polik *relism*, jurnal dan website yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan yang peneliti kaji, yaitu gerakan politik Hizbut Tahrir.

---

[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 3.
[23] Arry Potingku, *Metodologi Penelitian Kualitatif Saja* (Jakarta: Nulisbuku.com, 2016), 95.
[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Data skunder

Data skunder merupakan data penunjang untuk menambahkan sumber data. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk gambar-gambar.[25] Dalam penelitian ini data-data pendukung berupa buku, jurnal, artikel, website, skripsi dan data-data pendukung lainnya yang berhubungan dengan tema kajian peneliti.

c. Metode pengolahan data

Selanjutnya adalah pengolahan dari data-data yang terkumpul untuk dijadikan sebagai laporan penelitian. Teknik pengolahan data ini menggunakan metode filosofis-politis. Serta tentang cara dan bagaimana pengertian filsafat politik yang penulis ambil dari buku-buku Machiavelli langsung sebagai sumber primer dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

2. Pendekatan

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan filsafat politik. Adapun pendekatan filsafat politik yaitu berusaha mengembangkan proyek yang sistematis dan mencakup seluruh filsafat praktis tentang politik, pendekatan ini perlu terlibat dalam totalitas citra politik, yaitu dengan terus menerus menemukan konsistensi pandangan politik satu sama lain, dan karena itu mengharuskan bentuk kajian yang bersifat perbandingan (*interdisciplinary*) atau memperhatikan antar hubungan dari berbagai pandangan politik.[26] Upaya yang dilakukan adalah meneluri gerakan politik HTI melalui tulisan-tulisan dari peneliti sebelumnya baik itu berupa buku, artikel, situs web, skripsi, tesis, dan lain-lain. Hasil pengamatan tidak semata-mata disajikan secara mentah melainkan dilakukan proses analisis

[25] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.
[26] Alan Brown, *Modern Political Thought* (Middlesex: Penguin Books, 1986), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara filosofis untuk memperoleh makna mendalam dengan menggunakan pisau analisis teori politik Niccolo Machiavelli.

3. Teori

Teori merupakan seperangkat konstruksi dan proposisi yang saling terkait dan menyajikan pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Teori bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.[27] Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori politik Niccolo Machiavelli untuk menganalisis gerakan Gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia sebagai objek material. Machiavelli telah mengamati tindakan politik anggota masyarakat dalam masing-masing negara. Ternyata dalam praktik berpolitik banyak ditemukan adanya anarki kekuasaan dan tidak adanya moral pada pemerintahan suatu negara (rezim lama direbut kekuasaanya oleh rezim baru untuk membangun kekuasaanya sendiri sebagaimana pengalaman Machiavelli di Florence). Karena itu Machiavelli melihat politik dalam praktiknya. penguasa merebut kekuasaan dari rezim yang lama menggunakan kekerasan baik itu dengan politik ketakutan atau dengan kekejaman sekalipun untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaannya.[28] Sejarah negara pada masa silam menggambarkan kekuasaan yang seperti itu.

Nilai virtu dalam teori Machiavelli dipahami sebagai individu yang memiliki kekuasaan mutlak untuk mendapatkan keinginannya. Seorang raja yang ideal tidak meminta atau memohon apa yang dia mau, tetapi mengambilnya secara fisik dan melakukan apa yang dia mau. Hal yang demikian melambangkan potensi

[27] W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 5.
[28] Frederick Mayer, *Ahistory of Modern Philosophy* (New York: American Book Company, 1951), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang sangat kuat di lapangan politik. Virtu juga bisa diasosiasikan dengan kelicikan yang ekstrim dan dengan usaha terus menerus untuk mengejar kekuasaan serta kebesaran diri dengan menghalalkan segala cara dan dengan membayar harga semahal apapun untuk mendapatkannya.[29] Virtu erat hubungannya dengan fortuna. Machiavelli mengartikan fortuna sebagai oposisi atau musuh dari tatanan politik, fortuna juga digambarkan sebagai ancaman bagi keamanan dan keselamatan negara. Machiavelli mengatakan bahwa fortuna dapat diatasi oleh pemimpin yang memiliki virtu yang luar biasa. Hal ini bisa ditemukan dalam karyanya *the prince*, kekuasaan selalu merujuk kepada kepentingan kekuasaanya sendiri, untuk melanggengkan kekuasaannya.[30]"

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi hasil laporan ke dalam lima bab, dimana setiap bab mempunyai pembahasan tersendiri dan berbeda dengan bab-bab yang lain. Adapun sistematika penyususan sebagai berikut:

Bab I berisi bahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pembahasan tentang teori politik Machiavelli yang penulis gunakan sebagai objek formal dari penelitian ini.

Bab III berisi pembahasan tentang bagaimana latar belakang gerakan politik Hizbut Tahrir tersebut sebagai objek material dari penelitian ini.

---

[29] Niccolo Machiavelli, *The Art of War*, terj. E. Setiawati Alkhatab (yogjakarta: Bentang Budaya, 2002), 60.

[30] Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa, terj. C. Woekirsari (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV berisi pembahasan analisis inti dari penelitian ini.

Bab V berisi kesimpulan dari analisis yang sudah dilakukan di bab iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FILSAFAT POLITIK NICOLO MACHIAVELLI

A. Biografi Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiavelli lahir tahun 1469. Ia besar di desa San Casciano salah satu negara kecil di Italia saat itu. Selama Masih kecil, ia telah menelusuri berbagai buku bacaan utamanya buku filsafat Yunani dan Romawi. Di usia tuanya, ia menjadi seorang pejabat dan kariernya menjulang pada tahun 1512 sebagai diplomat selama 14 tahun di Republik Florentine Italia selama pengasingan keluarga Medici. Ketika keluarga Medici kembali berkuasa pada tahun 1512, ia dipecat dan dipenjara.[1] Ia kemudian menulis buku pegangan untuk para politisi tentang penggunaan kelicikan, kelicikan yang melayani diri sendiri, mengilhami istilah Machiavellian dan menetapkan Machiavelli sebagai bapak teori politik modern. Ia juga menulis beberapa puisi dan drama. Ia meninggal 21 Juni 1527 di Florence, Italia.[2]

Meskipun hal itu merupakan periode gelap untuk kariernya, waktu Machiavelli yang dari politik memberinya kesempatan untuk membaca sejarah romawi dan menulis risalah politik, terutama buku *The Prince*. Tema utama dari karya pendek tersebut tentang pemerintahan monarki dan bertahan hidup merupakan kemampuan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri berlawanan dengan kekuatan nasib, yang telah ditafsirkan sebagai filosofi politik bahwa seseorang dapat menggunakan segala cara untuk membangun dan melestarikan

[1] Fuad Muhammad Zein, "Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Al-Mawardi)", *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2016), 496.
[2] "Niccolo Macchiavelli", Https://www.biography.com/amp/scholar/Diakses 07 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

total wewenang. Karya tersebut telah dianggap sebagai buku pegangan bagi para politisi. Berbagai kalangan menyebut buku tersebut didasarkan pada tokoh Cesare Borgia yang sangat terkenal. Sementara Paus Klemens VII mengutuk buku *Sang Penguasa* atas dukungannya terhadap pemerintahan dengan tipu daya dan ketakutan. Salah satu kutipan dari buku itu berbunyi, "karena cinta dan ketakutan hampir tidak bisa hidup bersama, jika kita harus memilih di antara mereka, jauh lebih aman untuk ditakuti daripada dicintai".[3]

Sejak abad ke 13 dan seterusnya, keluarga Machiavelli kaya dan terkemuka, memegang kantor-kantor paling penting di Florence. Ayahnya, Bernando, seorang pakar hukum. Dihalangi dari jabatan publik di Florence sebagai debitor yang bangkrut, Bernando harus hidup dengan hemat, mengelola tanah sendiri yang kecil di dekat kota dan menambah penghasilannya yang sedikit dengan pendapatan dari pekerjaan profesinya yang terbatas dan hampir rahasia.[4]

Bernando juga menyimpan perpustakaan tempat Nicolo Machiavelli harus membaca. Pada saat itu, Florence merupakan pusat filsafat yang berkembang dan karya seni yang brilian. Ia juga pernah belajar bahasa Latin dengan baik dan mungkin juga tahu beberapa bahasa Yunani. Ia tampaknya juga memperoleh pendidikan humanis yang diharapkan dari pejabat Kanselir Florentine.[5]

Selama hidupnya, Niccolo Machiavelli telah menghasilkan beberapa karya penting di antaranya buku *The Prince, Discourse on the First Ten Books of Livy, The Art of War, On the Way to Deal with the Rebel Subjects of the*

[3] Zein, *Kritik Konsep*, 498.
[4] "Niccolo Machiavelli", Https://www.britannica.com/biography/Diakses 07 Januari 2020.
[5] Ibid., 05:44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Validichiana, Florentine Histories, The Mandrake, The Life of Castruccio, dan Castracani of Lucca.

Setelah menelusuri diskursus teori politik Niccolo Machiavelli secara mendalam, ada satu ciri khas personifikasi dari pemikirannya dan dua hal sebagai kesimpulan dari seluruh diskurus teori politiknya. Pertama, ciri khas pemikiran Machiavelli adalah realisme yang selalu berpatokan pada kenyataan atau sesuatu yang nyata, atau dalam bahasa Machievelli, kehidupan yang sudah atau sedang dialami. Ciri khas pandangan realisme tersebut sempat mengesampingkan moralitas dan etika karena keduanya berada di ranah religius.[6] Untuk itulah para pembaca teori politik Machiavelli menganggap dirinya terlalu mengabaikan aspek-aspek nilai religius dan menyukai berbagai aspek meskipun aspek kekerasan dan kekejaman.[7]

Kedua, dua hal dari teori politik Machiavelli tercakup dalam dua kata *"virtu"* dan *"fortuna"*. Machiavelli menggunakan kata *virtu* di berbagai hal sehingga maknanya sangat beragam. Menurut L. William Liddle, makna *virtu* mengacu pada keterampilan dan kejantanan seorang pemimpin.[8] Ada pula tokoh yang mengartikan *virtu* adalah seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, sifat mulia, dan kecakapan diri.[9] Sampai di sini dapat kita tarik benang bahwa *virtu* merupakan berbagai macam sifat yang melekat pada seorang pemimpin seperti

---

[6] M. Sastrapratedja dan Frans M. Parera, *Kata Pengantar: Suatu Alternatif Kaidah Etika Politik*, dalam Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa*, terj. C. Woekirsari, (Jakarta: Gramedia, 1991), 38.
[7] Daya Negri Wijaya, "Humanisme Menurut Niccolo Machiavelli, *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, Vol. 02, No. 02 (Oktober 2017), 1.
[8] R. William Liddle, *Marx atau Machiavelli? Menuju Demokrasi Bermutu di Indonesia dan Amerika* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001), 27.
[9] Ali Kartawinata, *Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat Politik al-Mawardi dan Machiavelli*, proposal—Universitas Gajah Mada, 2017, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raja dan Presiden. Sifat-sifat yang beragam itu tidak hanya mengacu pada sifat baik semata, seperti lemah lembut dan penyayang, melainkan juga sifat kejam dan keras. Sehingga *virtu* yang baik dari seorang pemimpin masih tidak jelas. Namun dengan beberapa jabaran nanti bisa membantu mengurai sifat itu yang masih umum dan tidak jelas. Mengapa demikian? Karena Machiavelli lebih memilih *virtu* daripada *fortuna* (nasib baik), karena *fortuna* adalah nasib yang tidak pasti dan mutlak, sehingga ketergantungan pada *furtuna* semata, bagi Machiavelli, merupakan kesalahan besar dari seorang pemimpin.

Virtu dan *fortuna*, berdasarkan analisis panjang dan mendalam, merupakan cermin dan pijakan dari seluruh pandangan politik Machiavelli dalam bukunya yang berjudul *Sang Penguasa.* Oleh karena itu, di sini penulis mencoba mengkonsep *virtu* dan *fortuna* terkait beberapa pandangan politiknya.

B. Pandangan Politik Machiavelli

Dalam buku *Sang Penguasa* terdapat dua kalimat dari Machiavelli setelah ia melakukan penelitian dan perenungan selama 7 tahun tentang politik dan kekuasaan yang mana hal tersebut bisa berlaku secara umum di semua negara. Ia mencatat bahwa pertama, kekuasaan di dalam sebuah negara pada masa silam (terutama Kekaisaran Romawi) sering kali terulang di generasi selanjutnya. Catatan tersebut benar adanya jika kita sedikit mengacu ke negara Indonesia yang pernah terjajah oleh negara asing selama ratusan tahun. Praktik-praktik kolonialisme sampai saat ini masih melekat di lembaga-lembaga pemerintahan. Kolonialisme dalam bentuk yang berbeda namun tetap menjajah negara ini secara ilegal, seperti korupsi, konspirasi gelap antar pebisnis dan pejabat pemerintah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sera hukum yang tidak egaliter. Menurut Machiavelli, pengulangan tersebut memang tidak total sama, namun pengulangan yang hampir sama. Karena demikianlah realitas politik. [10]

Kedua, acuan Machiavelli terhadap kondisi riil politik di masyarakat Italia, berujung pada catatan bahwa kehidupan politik tak lepas dari tanda-tanda adanya praktik anarki kekuasaan dan degradasi moral hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.[11] Kedua tanda tersebut, jika kita amati, tidak hanya terjadi di Italia melainkan juga di negara-negara lain, khususnya Indonesia. Praktik anarki kekuasaan sudah sering terjadi di negara ini, melanggar dan bahkan menjual undang-undang. Semua praktik anarkisme oleh pejabat pemerintah dan politisi menghendaki kekuasaan secara pribadi tampa peduli kehidupan masyarakat. Sehingga tidak heran jika dampaknya adalah degradasi moral antara hubungan masyarakat dan pemerintah. Ketidakpercayaan lahir dari proses anarkisme yang merugikan negara. Selain itu anarkisme kekuasaan terjadi saat generasi baru merebut kekuasaan dari tangan penguasa lama dan membangun fondasi-fondasi baru yang menurut Machiavelli kadang perebutan itu melalui kekerasan dan kekuatan. Dalam hal ini, kehidupan kekuasaan tunduk pada hukum alam, di mana suatu saat kekuasaan itu tak selamanya berada di satu pemimpin saja, melainkan bisa di pemimpin lain.[12]

Namun semua itu memang merupakan kehidupan kekuasaan. Ia kadang tenggelam dan bangkit. Sehingga pemimpin atau raja tidak baik jika sampai

---

[10] Sastrapratedja, *Kata Pengatar*, 32.
[11] Ibid., 33.
[12] Niccolo Machiavelli, *Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1996), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenggelam karena persoalan itu yang memang jadi kodrat manusia yang terbatas. Untuk itulah Machiavelli menyarankan agar seorang pemimpin dan raja memanfaatkan "legalitas konstitusional, bonafiditas lembaga-lembaga agama untuk membangun opini publik" dengan baik untuk melancarkan aksi politiknya guna memperolah kekuasaan yang berdampak pada stabilitas suatu negara.[13]

Mengenai pandangan Machiavelli terhadap penguasa atau raja, yaitu bahwa penguasa atau raja dalam menjalankan politik dan konstitusi hendaknya tidak bertolak pada kemauan masyarakat apakah baik atau buruk, melainkan bertolak pada politik yang efisien. Dalam hal ini, pertimbangan langkah politik penguasa harus bergantung pada keadaan dan desakan situasi sosial.[14] Artinya, stabilitas politik lebih penting di sebuah negara walaupun harus kontradiksi karena ketergantungan pada opini publik terkadang tidak mendatangkan manfaat. Negara harus eksis dengan baik. Stabilitas politik di sebuah negara juga ikut menentukan keadilan dan kesejahteraan.

Fenomena kontradiksi langkah politik pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang tak bisa dihindari. Karena pertemuan pandangan yang melahirkan kontradiksi ini akibat dunia masyarakat berbeda dengan pemerintah. Mungkin maksud itulah yang ingin Machiavelli sampaikan kepada kita. Dalam hal ini langkah politik penguasa dan aparat negara yang bergantung pada opini publik tentang baik dan buruk berpotensi berakhir dengan kegagalan. Penguasa

[13] Sastrapratedja, *Kata Pengantar*, 34.
[14] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan anggotanya yang memahami betul kondisi negara dan tindakan politik apa yang seharusnya dilakukan.[15]

Kebaikan moral yang terbesar bagi Machiavelli adalah sebuah negara yang stabil dan bajik atau dalam istilah Machiavelli yaitu *virtous*. *Virtous* disini berarti mendatangkan kebaikan, jadi untuk melindungi negara dibutuhkan tindakan-tindakan melindungi atau mengamankan negara bagaiumanpun caranya baik itu dengan membuat ketakutan atau kekejaman yang paling parah sekalipun dapat dibenarkan. Namun Machiavelli menyarankan penguasa jangan sampai dibenci apabila ada cara-cara lain selain menggunakan cara kekerasan. Namun berbeda apabila penguasa tidak mendapatkan dua-duanya, ia lebih menyarankan ditakuti dari pada dicintai.[16]

Untuk itulah Machiavelli menyarankan seorang penguasa atau raja hendaknya tidak mengutamakan legitimasi moral dan religius, melainkan fokus terhadap kekuasaan yang tidak stabil menjadi stabil. Dengan itu stabilitas kekuasaan dan politik akan mengarah juga pada stabilitas negara. Stabilitas negara yang baik juga mengarah pada stabilitas keadilan dan kesejahteraan.[17] Dalam hal ini, pandangan Machiavelli lebih mengarah pada desakan dan tuntutan situasi genting yang potensial menimbulkan turunnya stabilitas kekuasaan. Untuk itulah, penguasa sedapat mungkin bisa mengamankan kekuasaannya.

Pengertian penguasa yang mempertahankan kekuasaan di sini bukan mengarah pada pemenuhan diri dan mengabaikan negara atau tugasnya.

---

[15] Machiavelli, *Politik Kerakyatan*, 12.
[16] Galuh Febri Putra, "Everything Is Permitted: Sebuah Ulasan Singkat Il Principe Karya Machiavelli" *Jurnal Poetika*, Vol. 3, No. 1 (Juli 2015), 76.
[17] Sastrapratedja, *Kata Pengantar*, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penstabilan kekuasaan bertujuan agar perlawanan oposisi untuk mengacaukan stabilitas negara, untuk merebut kekuasaan dengan menurunkan dan mengganggu stabilitas negara, bisa diatasi dengan baik. Menurut M. Sastrapratedja dan Parera, moral berada di ranah harapan, sedangkan ketatanegaraan berada di wilayah kenyataan. Perbedaan antara harapan dan kenyataan yang membuat Machiavelli lebih memperhatikan politik secara total daripada moral. Tujuan politik jauh lebih nyata dari tujuan moral dan negara harus mengejar tujuan-tujuan yang nyata itu.[18]

1. Angkatan Bersenjata

Memperoleh stabilitas negara yang baik merupakan suatu langkah yang tidak mudah. Negara adalah lumbung kekuasaan yang menjadi harapan banyak orang. Keinginan seseorang pada kekuasaan sering kali menggunakan cara-cara politik yang anarkis. Bahkan menggunakan cara-cara fatal yang tidak peduli dengan kekerasan, kekejaman, perusakan citra, dan cara-cara lainnya. Dalam hal ini, kata anarki kekuasaan yang dilontarkan Machiavelli menginformasikan bahwa negara butuh angkatan bersenjata untuk menjaga kestabilannya. Sistem hukum tidak akan baik kalau tidak ada angkatan bersenjata yang baik. Karena yang menjamin sistem hukum bisa berjalan dengan baik adalah angkatan bersenjata. [19]

Indonesia sebagai negara hukum sudah ada angkatan bersenjata. Mereka benar-benar ikut mengiringi proses perjalanan hukum di Indonesia. Menjaga hukum tetap egaliter dan menjadi pengeksekusi pelanggar hukum. Pandangan Machiavelli tersebut saat ini sudah berjalan di semua negara,

[18] Ibid., 38.
[19] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan angkatan bersenjata menjadi lembaga inti dalam menjaga kedaulatan sebuah bangsa. Artinya, angkatan bersenjata benar-benar menjadi kebutuhan primer sebuah negara.

Hal terpenting dari fokus utamanya bahwa baik negara lama atau baru landasan hukum dan keamanan harus sangat kuat.[20] Bahkan ia menyarankan agar pasukan perang dalam mengamankan negara harus dipimpin oleh penguasa/pemimpin sendiri. Raja atau pemimpin harus menjadi panglima perang. Namun Machiavelli sangat melarang raja atau pemimpin sebuah negara menggunakan pasukan asing atau pasukan bantuan. Karena mereka bisa berpotensi tidak taat pada aturan bahkan bisa menjatuhkan pasukan perang. Lebih baik menggunakan pasukan sendiri. Oleh karena itu, *virtu* seorang raja atau pemimpin harus memiliki kemampuan yang banyak meskipun tidak sempurna.[21]

Lebih baik manakah memimpin dengan belas kasih dan kekejaman? Tentu semua raja ingin dianggap baik dan terpuji. Namun semua pemimpin bebas menggunakannya asalkan tepat pada tempatnya. Misalnya, seorang pemimpin atau raja harus waspada agar tidak salah menggunakan rasa belas kasihnya. Pemimpin yang bernama Cesare Borgia terkenal sebagai orang yang kejam, namun ternyata di balik sifat kejamnya membuat kerajaan Romagna lebih baik, bersatu, dan lebih aman.[22] Catatan ini menginformasikan bahwa bermurah hati atau kejam kedua-duanya bisa

[20] Niccolo Machiavelli, *Sang Penguasa*, terj. C. Woekirsari (Jakarta: Gramedia, 1991), 99.
[21] Ibid., 105.
[22] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan kebaikan dan keburukan. Artinya, hasil baik dan buruk tergantung pada arah tujuan dan kebijakannya.

2. Empat Hal Yang Harus Dihindari Penguasa

Seorang penguasa, pemimpin, atau raja agar sukses menjaga stabilitas negaranya, ada empat hal yang menurut Machiavelli harus dihindari.[23] Pertama, "tidak menghancurkan negara-negara yang lemah". Daripada menghancurkan negara lemah, lebih baik memanfaatkannya sebagai hubungan antar negara yang saling mendukung satu sama lain. Yang pasti, negara lemah bukan berarti tidak berarti apa-apa. Saat ini hubungan politik Internasional antar negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Salah satunya ketika Mesir dapat dukungan menjadi negara yang merdeka dari Indonesia, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bersumbangsih menjaga negara satu sama lain. Namun di sisi lain persaingan antar negara tidak bisa dihindari, tapi persaingan tetap harus kompetitif yang edukatif dan humanis. Dengan itu, raja atau pemimpin negara dalam menjalankan politiknya dan menjaga stabilitas negara akan berjalan dengan lancar.

Kedua, "tidak menambah kekuasaan seseorang yang sudah kuat dan berkuasa di Italia." Teori politik Machiavelli sangat menekankan seorang pemimpin atau raja untuk memperkuat kekuasaan dirinya saja. Baginya, kekuasaan raja sangat sentral dan ia harus lebih kuat dari yang lain. Kekuatan dirinya akan membuat dirinya paling berkuasa. Kekuasaan dirinya tidak hanya pada faktor pribadi saja, tapi secara umum. Misalnya memperkuat

[23] Ibid., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaannya (sebagai pemimpin atau raja) dengan membuat angkatan bersenjata, beraliansi dengan negara-negara lain, memecat anggotanya yang berkhianat, dan membuat sistem hukum yang bisa menjamin kesejahteraan dan keadilan masyarakatnya. Dalam hal ini, tidak menambah kekuasaan seseorang yang sudah kuat agar kekuasaan sang raja atau pemimpin tidak tergilas oleh mereka yang bertambah kekuasaannya.

Mengacu pada Indonesia sebagai negara hukum yang mana praktik korupsi sering terjadi, ketidakadilan, dan dehumanisasi merupakan tanda kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku. Tanpa kekuasaan, mereka tidak dapat korupsi, tidak adil, dan dehumanisasi. Pejabat negara yang korupsi menyalahgunakan kekuasaannya, pelaksana hukum menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan hukum sebagai produk jual beli. Fakta ini menunjukkan, jika kekuasaan jatuh kepada orang yang salah akan berakibat fatal. Oleh karena itu Machiavelli menyarankan agar kekuasaan raja atau pemimpin negara lebih kuat daripada yang lain.

Ketiga, “tidak memasukkan ke dalam negara seorang raja asing yang sangat kuat.” Dan keempat, “harus tinggal di negaranya sendiri.” Bagaimana berkuasanya seorang raja atau pemimpin, ia harus tetap tinggal di negaranya sendiri.

3. Memerintah Kota Yang Baru Ditaklukkan

Buku *Sang Penguasa* memiliki konteks yang berbeda dengan sekarang. Dahulu raja sering melakukan perluasan wilayah kekuasaannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan melakukan penaklukkan wilayah-wilayah lain.[24] Untuk wilayah yang baru ditaklukkan tentu seorang raja tidak senormal memerintah di wilayah sebelumnya. Membutuhkan cara-cara tertentu agar masyarakat di wilayah kekuasaan barunya bisa tunduk kepada raja. Walaupun konteksnya sangat berbeda dengan konteks negara sekarang, tapi kita bisa rekontekstualisasi dan mengambil pelajaran-pelajaran untuk memerintah sebuah wilayah yang sulit mengatur masyarakatnya. Machiavelli memberi tiga cara.[25] Pertama, menghancurkannya. Interpretasi kata "menghancurkan" bisa berarti menguasai wilayah baru itu secara total, dan tentunya seorang raja atau pemimpin harus memiliki kekuasaan yang kuat dan kebijaksanaan di mata masyarakat agar mereka takut dan menghormatinya. Saat ini pemimpin lokal banyak yang menggunakan cara itu. Biasanya pelakunya adalah Kepala Desa. Kepala Desa aktif jika ingin kekuasaannya tetap ada padanya, ia harus berkuasa sepenuhnya di masyarakat dan menjamin wilayahnya selalu aman dan sejahtera.

Kedua, bermukim di wilayah itu. Cara ini membantu pemimpin lebih dekat dengan masyarakat dan bisa mengenal masyarakat dengan baik, dan mengenal wilayah untuk menjaga keamanan masyarakat. Jika pemimpin bisa melakukan cara ini dengan baik, sangat mungkin masyarakat di wilayah itu tunduk dan mengikuti perintahnya. Ketiga, "mendirikan suatu oligarki yang akan menjamin wilayah itu tetap bersahabat dengan Anda". Pemerintahan oligarki yang seluruh kekuasaan adalah milik pemimpin atau raja. Hal ini

[24] Putra, *Sebuah Ulasan*, 76.
[25] Machiavelli, *Sang Penguasa*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat memungkinkan masyarakat takut dan mematuhi sistem hukum dari pemimpin atau raja. Menurut Machiavelli, karena sebuah bangsa atau wilayah yang hidupnya sangat merdeka atau sudah nyaman dengan pemimpin sebelumnya, maka penakluk baru akan mengalami kesulitan kecuali ia bisa melakukan tiga cara yang sudah tersebut tadi.[26]

Machiavelli kembali menegaskan bahwa "tidak ada yang lebih sulit pengaturannya, lebih meragukan keberhasilannya, dan lebih berbahaya pelaksanaannya daripada prakarsa mengubah undang-udang suatu negara."[27] Dampak pertama dalam proses pembaruan, masyarakat yang sudah nyaman dengan sistem sebelumnya akan memusuhinya karena telah menggagu kenyamanan mereka. Hal ini juga berlaku bagi negara-negara yang baru melakukan pergantian pemimpin atau pergantian dari negara demokrasi ke negara Islam. Preferensi tersebut ditujukan kepada penguasa baru yang berhasil meruntuhkan kekuasaan lama dan memerintahkannya. Untuk berhasil, Machiavelli secara tak langsung mengatakan harus melalui genjotan senjata. [28]

Model politik Machiavelli memang terkenal anarkis dan kejam. Banyak tokoh yang menyebut politik Machiavelli mengarahkan orang-orang merebut kekuasaan dengan cara kekerasan atau menghalalkan segala cara.[29] Genjotan senjata seorang penguasa merupakan representasi kelaki-lakian

[26] Ibid., 69.
[27] Ibid., 73.
[28] Ibid., 73.
[29] Fernando Manulang, "Niccolo Machiavelli: Sang Belis Politik? Suatu Refleksi dan Kritik Filosofis Terhadap Gagasan Politik Machiavelli Dalam Il Principe, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*", Vol. 10, No. 4 (Desember 2010), 526.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bagi Machiavelli hal itu harus dimiliki oleh seorang penguasa. Namun demikian, Machiavelli memang membenarkan cara tersebut tetapi dengan beberapa syarat, di antaranya cara keras dan kejam seorang penguasa atau raja harus sekali terjadi dan kemudian sikap cara itu tidak boleh terjadi lagi, beralih ke keselamatan rakyatnya. Lalu apa kekejaman buruk seorang penguasa? Tidak lain adalah kekejaman yang terus berlangsung tanpa henti. Dalam hal ini, ia bermaksud bahwa penguasa terbaik adalah mereka yang menggunakan cara damai untuk menstabilkan negaranya, kecuali dalam keadaan tertentu kekejaman boleh digunakan.[30]

Machiavelli juga mengartikan *fortuna* sebagai keberuntungan. tetapi kepada pengertian kondisi alamiah dan sosial manusia, Machiavelli mengatakan bahwa *fortuna* menentukan setengah dari tindakan kita, dan setengahnya lagi ada pada diri kita, agar supaya kebebasan kita selalu berlaku. *Fortuna* juga diibaratkan dengan seorang perempuan dan jika kamu hendak menguasainya maka kamu harus menyiksanya secara terus menerus.[31]

Di sebuah bab dalam buku *Sang Penguasa* Machiavelli juga menyinggung nasib mujur *(fortuna)* seorang penguasa dalam merebut sebuah wilayah tanpa mengalami kesulitan. Ia memperoleh kekuasaan barunya berbeda dengan yang lain. Bisa saja karena pemberian atau rakyat di wilayah itu meminta sang penguasa memimpinnya. Namun yang pasti dari catatan Machiavelli bahwa ia akan tetap menemui kesulitan saat sudah memegang kekuasaan. Sangat mungkin ia akan menghadapi kesulitan baik jika ia

[30] Machiavelli, *Sang Penguasa*, 87.
[31] Liddle, *Marx atau Machiavelli*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kredibilitas kepemimpinan yang baik. Namun berbeda lagi jika sang penguasa yang bernasib mujur tanpa memiliki pengalaman kepemimpinan sama sekali.[32]

Namun sisi nasib kemujuran seorang penguasa ini hikmahnya juga besar baginya, apabila kemujurannya karena rakyat sendirinya yang meminta dirinya memimpin mereka. Konteks ini tentu berbeda dengan konteks penguasa yang memperoleh kekuasaannya dengan cara-cara keras. Manfaatnya, pemimpin bernasib mujur akan mendapat dukungan penuh dari rakyat sehingga tanggung jawabnya tidak terlalu besar. Rakyat akan mendukungnya saat sang pemimpin mengalami kesulitan. Rakyat taat hukum. Nasib mujur ini mungkin lahir dari rasa cinta antara rakyat dan pemimpin tersebut.[33] Indonesia dulu memiliki pemimpin yang nasibnya sangat mujur, yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kala itu ia hanya berkampanye pas-pasan tanpa menggunakan *money politic.* Namun karena nasib kemujurannya, rakyat Indonesia lebih memilih dirinya sebagai Presiden RI dan suara terhadap dirinya melampaui calon-calon dari partai lain.

Seperti halnya dengan *virtu*, biasanya Machiavelli mengidentifikasi *fortuna* dengan kekuatan yang tidak dapat dihitung dan bersifat kebetulan, terkadang ia bersifat kosmik seperti halnya nasib. Di dalam bukunya *The Art of War*, hidup manusia dipahami dengan istilah suatu perjuangan antara *fortuna* dan *virtu*. *Fortuna* bisa jadi menempatkan kita dalam keadaan khusus,

[32] Machiavelli, *Sang Penguasa*, 87.
[33] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun apakah kita menegendalikan kehidupan kita, ketimbang menjadi bahan permainan dari kesempatan, bergantung pada *virtu* kita.[34]

Hal menarik lainnya dari buku *Sang Penguasa*, Machiavelli meskipun lebih dominan membahas kekuasaan raja, tapi dalam bab tertentu, ia sebenarnya lebih membanggakan negara yang dikuasai gereja. Alasannya karena negara semacam itu lebih dikuasai kekuatan adi luhur yang tak masuk pada proses nalar budi manusia. Ia mengambil contoh pada masa pemerintahan Paus Alexander VI dan Julius yang baginya cara kepemimpinan mereka belum pernah digunakan oleh orang lain. Apa itu? Mereka mengabdikan segenap jiwa dan raganya untuk memperkuat kekuasaan Gereja dan bukan kekuasaan pribadi semata. Untuk itulah golongan Orsini dan Colonna pada waktu itu sangat menghormati Gereja. Yang lebih menarik bagi Machiavelli, karena mereka tidak mengutamakan cara-cara keras dan kejam, melainkan cara-cara terhormat.[35]

4. Pemimpin Terpuji Dan Terkutuk

Di bab ini filsafat Machiavelli mulai tampak. Dalam persoalan sifat terpuji dan terkutuk, ia mencatat satu inti persoalan yaitu bahwa masalah "bagaimana orang harus hidup dan bagaimana sesungguhnya hidup telah membuat orang-orang lupa pada apa yang sebenarnya terjadi dan lebih memikirkan apa yang harus dilakukan."[36] Dalam hal ini, ia menggambarkan bahwa apa yang terjadi sangat kompleks dan manusia tak akan pernah bisa

---

[34] Niccolo Machiavelli, *The Art of War*, terj. E. Setiyawati Alkhatab dan Toni Setiawan (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002), 54.
[35] Machiavelli, *Sang Penguasa*, 98.
[36] Ibid., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup dengan sempurna. Tidak mungkin seorang pemimpin atau raja mempunyai semua sifat kebaikan lantaran kodrat mereka yang tidak sempurna. Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin atau raja di tengah keterbatasannya adalah hendaknya menghindari dari perilaku tak terpuji dan tidak berbahaya. Selain itu raja atau pemimpin tidak perlu cemas karena tuduhan jahat, karena terkadang perilaku jahat mendatangkan kebaikan, begitu pula sebaliknya. Ia hanya perlu melakukan yang terbaik demi negara dan rakyatnya.

Dari ulasan-ulasan di atas tentang politik model Machiavelli bisa kita tarik satu kesimpulan kecil dan singkat. Menurut Machiavelli ada dua cara berjuang, pertama, melalui hukum dan kedua, melalui kekerasan. Cara pertama merupakan cara yang sudah wajar sedangkan cara kedua adalah sifat kebinatangan. Seorang pemimpin harus memiliki dua model perjuangan itu untuk menjaga stabilitas negaranya. Karena jika pemimpin dan raja hanya memiliki satu perjuangan, misalnya hanya dengan hukum, terkadang hukum tidak mendatangkan ketertiban melainkan sebaliknya.[37] Oleh karena itu, ia harus setengah manusia (hukum) dan setengah binatang. Dua perjuangan itu seolah adalah representasi dari kedisiplinan dan ketegasan seorang pemimpin.

[37] Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GERAKAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir atau yang lebih dikenal dengan sebutan HT adalah partai pembebasan, organisasi ini merupakan organisasi politik Islam berlevel internasional yang mengajak umat Islam untuk memperjuangkan tegaknya khilafah Islamiyah agar kembali kepada kehidupan Islam yang murni. Taqiyuddin al-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir pada tahun 1909-1977 M, dan pada tahun 1953 Hizbut Tahrir secara resmi mempublikasikannya kepada umum.[1]

Sejak organisasi ini didirikan, taqiyuddin al-Nabhani memimpin Hizbut Tahrir hingga wafatnya pada tanggal 20 Juni 1977 M. Taqiyuddin al-Nabhani adalah seorang doktor dari Universitas Mesir Al-Azhar Kairo, sebelumnya dia merupakan seorang hakim di Isti'naf al-Quds palestina, sehingga menjadikan Taqiyuddin al-Nabani seorang tokoh dan ulama yang berpengaruh di Palestina.[2] Setelah wafatnya Taqiyuddin al-Nabhani, kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh Abdul Qadim Zalum hingga wafatnya pada tahun 2003. Hingga saat ini pemimpin HT dipegang secara internasional oleh Syaikh Atha' Abu Rastah.[3]

HT tercatat sudah beberapa kali melakukan upaya pengambil alihan kekuasaan dibeberapa negara-negara Arab, seperti halnya di Yordania pada tahun 1969, di Mesir pada tahun 1973, di Iraq, Sudan, Tinisia, Aljazair yang dilakukan

---

[1] Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani* (Bogor: Al-Izzah Press, 2002), 4.
[2] Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, trj, M Machfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 359.
[3] Endang Turmudzi dan Riza Sihabudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2006), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara serentak pada tahun 1973, namun usaha itu sia-sia. Setelah gagal melakukan pengambil alihan kekuasaan HT mulai merubah taktiknya dengan melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah.[4]

HT menggunakan metode merekrut dan membina anggotanya dengan mencontoh metode dakwah Rasullullah SAW. Menurut HT umat Islam saat ini memprihatinkan karena mereka menerapkan sistem kufur dan tidak mencontoh Rasullullah ketika diutus menyampaikan risalah Islam. Untuk itu Rasulullah harus dijadikan tauladan bagi umat muslim karena keberhasilan beliau mendirikan kekhilafahan Islam di Madinah.

Dengan meniru dakwah yang diajarkan Rasulullah, HT merumuskan tiga tahap dakwah dan strategi beserta ciri-cirinya: *Pertama*, pengkaderan dan pembinaan dengan diadakannya halaqah-halaqah. Dalam Tahap ini bertujuan untuk mencetak kader-kader baru yang mempercayai metode dan pemikiran HT untuk membentuk sebuah partai. *Kedua*, melakukan interaksi langsung dengan masyarakat. Tahapan ini bertujuan agar umat Islam dapat menjalankan kewajiban dalam berdakwah, dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya yang dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik. *Ketiga*, tahap merebut kekuasaan. Tahapan ini bertujuan untuk menerapkan Islam kepada seluruh dunia.[5]

HT merealisasikan idenya dan berjuang di tengah-tengah masayarakat untuk memberikan pemahaman yang diwacanakan HT dengan mendirikan kembali sistem khilafah islamiyah. Tugas yang diemban HT yaitu meneruskan ajaran Islam dan mendakwahkannya ke seluruh penjuru dunia. Tujuannya yaitu

---

[4] Samarah, *Biografi Singkat*, 5.
[5] Muhammaddin, "Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Sistem Negara Islam Modern" *Intizar*, Vol. 22, No. 2 (2016), 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajak umat Islam agar supaya hidup secara islami sesuai aturan dalam Islam, didalam kesatuan daulah Islam, artinya seluruh kegiatan umat Islam diatur oleh aturan atau undang-undang Islam.[6]

B. Sejarah Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia

Hizbut Tahrir (HT) dibawa masuk ke Indonesia oleh Abdurrahman al-Baghdadi pada tahun 1983, sehingga organisasi ini lebih dikenal dengan sebutan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI berpusat di Bogor dan dipimpin oleh Muhammad al-Khattat yang merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor. Meskipun HTI merupakan partai politik, akan tetapi organisasi ini tidak ikut andil secara legal sebagai partai politik sebagaimana partai-partai lainnya yang mengikuti pemilu, karena menurutnya, semua partai Islam yang ada di Indonesia justru membuat bingung umat Islam.[7] Oleh karena itu, organisasi ini tidak ikut-ikutan seperti partai lainnya yang berasaskan Islam untuk mengikuti pemilu dan menjadi salah satu anggota legislatif di pemerintahan.

Hingga kedatangannya gerakan ini ke Indonesia, kegiatan dilakukan secara tertutup selama kurang lebih sepuluh tahun. Hal ini dikarenakan HTI lahir pada masa pemerintahan Soeharto yang melarang seluruh bentuk gerakan radikal yang tidak berideologi pancasila. Pascareformasi, HTI dengan leluasa melakukan seluruh aktivitasnya secara terbuka, hal ini terbukti dengan diadakannya acara terbuka yaitu diskusi tentang syariah ke beberapa daerah seperti di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Tidak hanya ke berbagai daerah, mereka juga aktif

---

[6] Mohammad Topan, "Kekuasaan Menurut Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Tinjauan Etika Politik" *Jurnal Filsafat*, Vol. 23, No 2 (Agustus 2013), 20.

[7] Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living Alquran Perspektif Komunikasi" *Episteme*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2017), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebarkan gagasannya ke perguruan tinggi yang melalui jaringan lembaga dakwah kampus yang dikenal dengan (LDK). Akan tetapi, sepak terjang HTI masih dalam pembinaan kader (*tasqif*) untuk memperkuat tubuh partai.[8]

Menurut HTI, negara Indonesia adalah salah satu sasaran mereka untuk menegakkan khilafah. Hal ini dibuktikan diadakannya konferensi khilafah internasional yang pertama pada 28 Mei 2000.[9] Konferensi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh HTI dari dalam negeri dan luar negeri sebagai pembicara, diantaranya: Dr. Muhammad Utsman (Indonesia), Muhammad al-Khattat (Indonesia), Syarifuddin M. Zain (Malaysia), Ismail al-Wahwah (Australia).[10] Dan untuk kedua kalinya konferensi dilakukan pada 12 Agustus 2007. Bahkan HTI mengundang presiden ke 6 yakni Susilo Bambang Yudhoyono agar mendirikan khilafah di Indonesia.[11]

Pada tahun 2011, juru bicara HTI, Ismail Yusanto mengatakan ada lima alasan besar bagi tegaknya khilafah di Indonesia, *Pertama*, dukungan dari umat Islam yang sangat besar, *Kedua*, HTI semakin meluas dan dakwah berjalan dengan aman, *Ketiga*, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Indonesia semakin menurun, *Keempat*, besarnya sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indonesia, *Kelima*, dilihat dari sejarah historisnya bahwa Indonesia pernah menerapkan syariat Islam.[12]

---

[8] Hayati, *Konsep Khilafah*, 174.
[9] Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: PT LkiS, 2012), 4.
[10] Ma'arif Jamuin, "Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia", *Suhuf*, Vol. 27, No. 2 (November 2015), 164.
[11] Al-Amin, *Membongkar Proyek*, 5.
[12] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, humas HTI dipegang oleh Ismail Yusanto, dan di Jawa Barat dipegang oleh Muhammad Syababi. HTI memperoleh dana dari para simpatisan dan dibangun atas dasar kemandirian, dan mereka menolak secara tegas menerima bantuan dari pemerintah bahkan mereka mengharamkan bantuan dari pemerintah. Maka dari itu untuk menjaga kemandirian suatu organisasi, HTI selalu hati-hati dalam menerima sumbangan yang diberikan oleh siapapun dan harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu.[13]

Menurut HTI, politik bukan hanya orang yang beraktivitas di dalam pemerintahan saja, akan tetapi politik adalah bagaimana cara mengatur dan menyelesaikan segala urusan umat Islam yang sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat Islam yang beraku. Sebab itulah, dalam aksi-aksinya, HTI sebagai pihak konfrontatif lebih banyak mengkritik pemerintahan yang dianggap sekuler. Di sini terlihat sekali bahwa HTI tidak ikut terlibat pada politik praktis, tapi HTI lebih aktif mengkampanyekan ideologi Islam kepada masyarakat.[14] Sejak masuknya HTI ke Indonesia, organisasi ini didesain sebagai partai politik. Akan tetapi organisasi ini tidak mau disamakan dengan partai politik lain yang kita kenal selama ini, HTI secara formal tidak pernah mencalonkan diri sebagai partai politik untuk mengikuti pemilu. Jadi dapat dikatakan, HTI adalah partai politik yang melakukan kegiatan politiknya di luar parlemen. [15]

HTI merupakan partai politik meskipun organisasi ini tidak secara resmi mencalonkan diri ke departemen kehakiman. HTI sebagai partai politik memiliki

---

[13] Afadlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 266.
[14] Mohammad Rafiuddin, "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)", *Islamuna*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015), 32.
[15] Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Gerakan di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga karakteristik: *Pertama,* secara ideologis partai ini berdasarkan Islam yang kemudian digunakan sebagai cara pandang dalam melakukan penilaian terhadap berbagai hal. *Kedua,* ruang geraknya bersifat transnasional hal ini dikarenakan HTI masih merupakan bagian dari Hizbut Tahrir yang ada di pusat yang memiliki banyak perwakilan di beberapa negara Asia dan Eropa. *Ketiga,* aktivitasnya bersifat extra parlementer.[16]

Bagi HTI, membangun syariat Islam dalam ruang lingkup kehidupan bernegara sanngat erat dengan tujuannya yaitu "membangun kembali daulah khilafah islamiyah di muka bumi, sehingga segala urusan pemerintahan dapat dijalankan sesuai yang diturunkan Allah".[17]

C. Gerakan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia

Infiltrasi atau penyusupan yang dilakukan oleh HTI di Indonesia merupakan sebuah fenomena penyusupan dalam bentuk gerakan dan pemikiran yang radikal, sehingga aktivitas tersebut dapat mengancam masa depan Indonesia. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Indonesia sejak dideklarasikannya sebagai negara yang merdeka tidak pernah menjadikan dirinya sebagai negara Islam. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi sistem demokrasi yang berdasarkan pancasila. Oleh karena itu, HTI didalam doktrinnya mengharamkan demokrasi dan pancasila agar dilenyapkan dari bumi Indonesia. Pemikiran yang demikian tentu bertentangan dengan sistem yang diterapkan negara Indonesia.[18]

---

[16] Turmudi, *Islam dan*, 265.
[17] Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007) ,389.
[18] Jamuin, "Infiltrasi Pemikiran, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari segi sosialnya, penyusupan yang dilakukan HTI sangat berdampak menimbulkan ketakutan pada umat Islam lebih-lebih umat Islam yang masih awam pemahamannya tentang Islam. Gerakan-gerakannya yang selalu mengkafir-kafirkan umat Islam lain yang berbeda pendapat dengannya, mengajak umat Muslim agar kembali kepada sistem kekhilafahan, dan menganggap haram sistem demokrasi, sehingga dihadapan para pemeluknya Islam menjadi tampak lebih rumit.[19] Namun dalam aksi-aksi demonstrasi mereka tidak menggunakan kekerasan, seperti halnya gerakan-gerakan yang lain. Tetapi ia menggunakan penyusupan pemikiran ke dalam organisasi lain yang sama berbahayanya dengan tindak kekerasan. Karena dengan begini HTI mampu mengembangkan dan menanamkan ideologi konflik.

Di Indonesia, HTI tidak pernah terbukti atas tindakan kekerasan fisik, akan tetapi ia terbukti melakukan tindakan "kekerasan kultural" (menyebar kebencian kepada kaum Muslim maupun non Muslim, yang tidak setuju atau memusuhi doktrin-doktrin HTI). Dan "kekerasan struktural" (melawan atas wacana pada pemerintah Indonesia, konstitusi, dan pancasila), yang kesemuanya membahayakan kesatuan NKRI, kebinekaan, dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.[20]

Dari pemikiran yang ekstrim tersebut sebenarnya bukan dari pemikiran umat Islam Indonesia, tapi pemikirannya berasal dari umat Islam Timur Tengah yang melakukan penyebaran pikiran ke Indonesia. Gerakan yang mengatasnamakan Islam tersebut sebenarnya dilatarbelakangi ketidakpuasan

[19] Ibid., 159.
[20] "Hizbut Tahrir dan Praktik Kekerasan", Http://m.liputan6.com/news/read/2960279/Diakses 17 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap ketertinggalan umat Islam atas kemajuan negara barat. Karena ketidakmampuannya mengimbangi dampak yang diberikan budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghalangi masuknya budaya-budaya Barat.

Dalam aksi politiknya HTI mengajak kaum laki-laki dan wanita untuk meyakinkan masyarakat terutama wanita bahwa saat ini wanita telah dijajah sistem sekuler seperti diadakannya Miss World Indonesia, feminism, wanita karier, dan lain sebagainya. Aksi ini melibatkan para wanita yang disebut dengan aksi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) pada 22 Juli 2011, yang diikuti lebih dari 200 remaja Muslimah dengan aksi damai "anak Indonesia tuntut Syariah dan Khilafah" dalam menyambut hari anak nasional. Aksi ini juga digelar *long marc* dari kawasan City Walk Sami Luwes menuju Bunderan Gladag.[21]

Penyusupan yang dilakukan HTI semakin terlihat jelas ketika anggotanya mulai menyebarkan pemikirannya ke sekolah Islam dan perguruan tinggi Islam. Seperti di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), beberapa dosen sudah banyak yang menjadi aktivis HTI. Mereka menyusun program yang disebut "Islamisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta" dengan menyusun kurikulum pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan yang hanya boleh diajarkan orang-orang tertentu, khususnya alumni timur tengah.[22]

Tidak hanya perguruan tinggi, HTI juga masuk ke dalam organisasi terbesar masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, ketua umum PBNU menyebutkan bahwa HTI telah mengambil alih masjid-masjid yang

---

[21] Fajar Purwawidada, *Jaringan Baru Teroris Solo* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 60.
[22] Jamuin, *Infiltrasi Pemikiran*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelola dan dibangun oleh warga NU. Masjid yang diambil alih oleh HTI salah satunya adalah masjid an-Nur desa Jatiwates, Tembelang, Jombang. Masjid lain yang dikendalikan oleh HTI dan menjadi ajang cuci otak adalah masjid Babul Jannah yang berada di desa Sengon Jombang. Hasyim Muzadi menyebutkan bahwa HTI melakukan penyusupan tersebut dikarenakan mereka tidak mampu membuat masjid sendiri dan kemudian menggunakan masjid itu untuk melakukan kegiatannya seperti menonton video tentang fenomena umat Islam saat ini dan kemudian mengaitkannya dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Kegiatan semacam itu hanya semata-mata untuk kepentingan politik.[23]

Di Muhammadiyah HTI juga tersebar melalui PKS dalam acara Muktamar Muhammadiyah di Malang pada tahun 2005 atas nama utusan peserta daerah. Dalam acara tersebut terjadi perdebatan keras antara aktivis HTI dengan Muhammadiyah. Ketika nama-nama perempuan diusung untuk dijadikan calon ketua Muhammadiyah dalam Muktamar, aktivis HTI meneriakkannya dengan gemuruh bahwa perempuan tidak layak untuk dijadikan seorang pemimpin Muhammadiyah, mereka menganggap bahwa perempuan tidak pantas dijadikan pemimpin, dan hal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Dan ketika perempuan berbicara diacara Muktamar tersebut maka teriakan dan cemoohan pun dilontarkan oleh perserta aktivis HTI.[24]

Apa yang dilakukan HTI tersebut tentu tidak terlepas dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. HTI memandang bahwa kaum perempuan tidak boleh berperan aktif dalam ranah politik, tapi perempuan cukup wajib menjadi ibu

---

[23] Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institut, 2009), 189.
[24] Ibid., 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga. Pemikiran seperti ini berbeda jauh dengan pemikiran organisi modernis seperti halnya NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi besar ini menjelaskan bahwa tidak ada masalah bagi seorang perempuan terlibat aktif dalam ranah politik, partai, dan Publik.[25]

Selain menyusup ke dua organisasi besar tersebut, HTI telah melebarkan pengaruhnya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI terkenal sebagai organisasi terkuat setelah NU dan Muhammadiyah karena keterikatannya dengan pemerintah maka ia memiliki fasilitas yang cukup besar, sejak didirikannya MUI, organisasi ini ditugaskan untuk menyangga kekuasaan dan menumpas gerakan radikal yang anti terhadap pemerintahan. Bagi MUI, organisasi apapun yang doktrin dan aqidah agamanya benar menurutnya, maka ia bisa bergabung tanpa mempertimbangkan organisasi apa dan dari mana organisasi tersebut berasal. HTI memiliki nasib yang mujur karena banyak aktivisnya masuk ke dalam organisasi terkuat seperti MUI tersebut. Meskipun HTI memandang demokrasi adalah haram namun ia memiliki aqidah yang benar di mata MUI.[26]

Langkah pertama yang dilakukan HTI yaitu mencari kader dan merekrutnya, lalu mereka menyebarkannya ke berbagai daerah. Dan mereka juga akan meluas ke organisasi besar. Dalam perekrutan tersebut lalu kader akan menyebarkan pemikirannya dengan meyakinkan umat Islam di Indonesia bahwa demokrasi yang ada di negeri ini adalah haram dan layak untuk dimusuhi. Setelah anggota dirasa percaya dengan pemikiran HTI, kemudian mereka disebar untuk melakukan hal serupa sehingga dapat dengan mudah bagi HTI untuk meraih

[25] Ibid., 167.
[26] Ibid., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan. Dengan masuknya pemikiran-pemikiran HTI ke dalam organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah dan MUI. Maka pemikiran dan gerakan infiltrasi HTI mengakibatkan masa depan Indonesia terancam.[27]

Sejak pendiriannya, Berdasarkan sejarah kekhilafahan di dunia Islam, ternyata sistem khilafah juga sarat akan kepentingan dan penguasaan. Kedudukan khalifah pertama, sejak Abu Bakar sampai saat ini, banyak mendapatkan penentangan dari mereka yang menolaknya. Jadi khalifah selalu berlalu dengan penumbangan para khalifah.[28] Meskipun begitu, mereka tetap yakin jika suatu saat khilafah akan berdiri, karena mendirikan khilafah adalah kewajiban atas umat Islam seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Bagi HTI, menegakkan khilafah adalah kewajiban umat Islam. Menurut, salah satu mantan ketua umum DPP HTI, mendirikan negara Islam adalah kewajiban yang paling agung dalam agama. Sementara umat Islam yang menolak untuk mendirikan negara Islam maka mereka berdosa, bahkan dicap sebagai orang yang melakukan maksiat paling besar.[29]

Bukan hanya dosa besar yang dijadikan ancaman oleh HTI kepada umat Muslim, tapi juga ditunjukkan kepada para penguasa yang telah menghalang-halangi HTI untuk mendirikan khilafah dan para kafir yang merampas dan menjajah negeri umat muslim. Hal ini sesuai dengan hasil kesepakatan muktamar di Jakarta pada 21 Juli 2009, bahwasanya mereka semua (penguasa tiran dan diktator) akan mendapatkan ganjaran atau hukuman bila khilafah terwujud. Hal

---

[27] Jamuin, *Infiltrasi Pemikiran*, 167.
[28] Ali Abd ar Raziq, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan Islam* (Yogyakarta: PT Jendela, 2002), 29.
[29] Al-Amin, *Membongkar Proyek*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini mirip dengan pengalaman salah satu mantan anggota HTI, yaitu Ainur Rofik al-Amin, salah satu dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, bahwa ketika terjadi perselisihan antara aktivis HTI dengan jamaah dakwah lain dalam perebutan pengaruh di masjid Universitas Airlangga pada tahun 1993-an. Ikhwan HTI sering melontarkan ucapan bahwa mereka yang tidak suka atau memusuhi dakwah HTI harus dicatat, dan apabila khilafah sudah berdiri, maka semua sudah masuk daftar hitam (*black list*) dan bersiap untuk menerima hukuman.[30]

Tindakan seperti itu sudah termasuk cara menakut-nakuti orang lain, cara seperti itu sangat efektif untuk sebagian kaum muslim, yang pada akhirnya mereka bergabung dengan organisasi ini. Salah satu juru bicara Hizbut Tahrir lebanon mengatakan bahwa organisasi ini selalu berbicara sesuai dengan Islam. jadi, siapa saja yang bersikeras memerangi pemikiran Hizbut Tahrir, maka ia dengan sendirinya menyatakan perang terhadap pemikiran Islam.[31]

Diterapkannya hukum Islam oleh presiden atau kepala negara di negara Islam seperti di Pakistan, Mesir, Sudan, Iran, dan sebagainya adalah tidak sah karena dianggap kufur. Anehnya, menurut pandangan HTI disahkan apabila ada pemberontakan di Negara Islam selama pemberontak itu menerapkan sistem Islam dengan catatan si pemberontak masih dalam koridor Islam, Sedangkan sekarang ini negara Islam menerapkan sistem kufur dan bertentangan dengan syariat Islam.[32]

---

[30] Ainur Rofiq al-Amin, "Dilema Konseptual Khilafah HTI: Sebuah Ketergesaan Kesimpulan", *Bayan*, Vol. 1, No. 3 (2012), 2.
[31] Ibid., 2.
[32] Al-Amin, *Membongkar Proyek*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu cara HTI untuk memperluas idenya ke tengah masyarakat yaitu dengan menentang pemikiran kelompok Islam lain yang menurutnya bertentangan dengan Islam. Mereka secara terang-terangan dan secara terbuka menentang para penguasa dan negeri kafir. Mereka secara terus-menerus menghadapi setiap hal yang bertentangan dengan Islam dan hukum-hukumnya. Tanpa memandang keselamatan dirinya, mereka rela mendapat perlawanan dari masyarakat atas dakwahnya asalkan mereka bisa meluaskan pemikirannya kepada umat.[33] Kemudian dalam mengambil alih kekuasaan, HTI membutuhkan dukungan dari para pemilik kekuasaan, seperti, TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Pengusaha, dan para Cendekiawan. Mereka semua diberi kesadaran oleh HTI betapa pentingnya mendirikan khilafah islamiyah ditengah-tengan negeri yang menganut paham sekuler ini.[34]

Menurut Ainur Rofik al-Amin sistem kekhilafahan yang dilontarkan oleh HTI akan membawa kepada pemerintahan yang *autocratik*. Autokratis adalah sistem dimana kekuasaan hanya terkontrol oleh satu orang saja yaitu seorang khalifah. Seorang khalifah memegang semua kendali atas pemerintahannya yang jabatannya seumur hidup. Autokratis merupakan sistem pemerintahan yang sedikit melibatkan peran rakyat. Model pemerintahan seperti ini menolak adanya oposisi, mereka tidak menoleransi adanya kritik dari rakyat atau oposisi.[35] Menurutnya rakyat tidak harus mengkritik khalifah, tapi sebaliknya, rakyat harus patuh terhadap khalifah dan undang-undang Islam.

---

[33] Hasanuddin, "Strategi Politik Hizbut Tahrir Dalam Menegakkan Khilafah Islam di Indonesia", *al-Fikra*, vol. 17, No. 1 (2018), 76.
[34] Ibid., 77.
[35] Ainur Rofiq al-Amin, "Kritik Pemikiran Khalifah Hizbut Tahrir Yang Autokratik" *Teosofi*, Vol. 7, No.2 (Desember 2017), 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ciri-ciri utama dari model pemerintahan autokrasi, sebagai berikut: *Pertama*, seorang autokrat identik dengan melakukan semacam penghasutan kepada rakyat. *Kedua*, autokrasi selalu menggunakan cara-cara pemaksaan dan kekuatan dalam kekuasaanya. *Ketiga*, autokrasi memakai kekuatan senjata. *Keempat*, pemimpin harus diikuti dan ditaati, dan ketika ada sebuah kesalahan, maka bawahannya yang akan menanggungnya. *Kelima*, para autokrat memberikan keamanan. *Keenam*, karakteristik sistem autokrat adalah melakukan ekspansi kekuasaan. *Ketujuh*, menggunakan agama sebagai alat penyokong kekuasaanya. *Kedelapan*, sistem autokrasi mengutamakan seorang pemimpim, partai, dan negara, jadi tidak ada individu yang difigurkan. *Kesembilan*, autokrasi tidak ada pemisahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya itu terletak atau dikonsentrasikan kepada autokrat. Dari ciri-ciri yang disebutkan tersebut, semuanya mengarah kepada doktrin khilafah HTI.[36]

HTI menjelaskan secara terperinci bagaimana kekuasaan khalifah yang begitu besar, adalah sebagai berikut:[37] *Pertama*, khalifah mempunyai wewenang mengadopsi serta melegalisasi hukum syariah yang menjadi aturan untuk seluruh umat manusia. Hukum syariah tersebut akan menjadi undang-undang dan konstitusi bagi umat. Aturan-aturan yang diadopsi menjadi undang-undang tidak boleh ditentang sekalipun hakim juga dilarang menetapkan aturan yang dibuat khalifah. Sebab hal ini mengacu pada kaidah ‘perintah seorang imam harus dijalankan dengan ikhlas’.

[36] Ibid., 437.
[37] Ibid., 447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, politik dalam dan luar negeri adalah tanggung jawab seorang khilafah, dia mempunyai hak penuh untuk mengangkat para pimpinan militer serta mengumumkan perang atau damai. Tentu hal ini berbeda dengan kebijakan pemerintah Indonesia bahwa perang harus perlu persetujuan dari DPR.

Ketiga, khalifah berwenang atas duta besar asing, dia bisa menerima atau menolak duta besar asing dan bisa mencopotnya sewaktu-waktu.

Keempat, para wali dan para *muawin* ditentukan dan dicopot oleh khalifah, seorang khalifah tanpa perlu klarifikasi kepada siapapun untuk memecat para wali dan *muawin*.

Kelima, khalifah yang memilih dan memecat para panglima perang, direktur negara, *qadi al muzallim* dan lain sebagainya. Disini yang bisa memecat khalifah adalah *qadi al muzallim*, dan *qadi al muzallim* bisa kapan saja dipecat oleh khalifah. Tentu disini khalifah lah yang akan memecat lebih dulu *qadi al muzallim* apabila sudah tidak sepaham lagi dengan pemikirannya, Karena mengingat pemegang tunggal kekuasaan adalah khalifah.

Keenam, APBN juga ditentukan oleh khalifah melalui hukum syariah baik itu pemasukan atau pengeluarannya. Dalam anggaran belanja negara, hanya khalifah yang mempunyai wewenang tanpa campur tangan dari pihak lain. Disini terlihat jelas bahwa khalifah memiliki posisi yang sangat kuat terhadap masalah keuangan, hal yang demikian tentu saja menjadi peluang dan rawan dengan adanya korupsi dan praktek manipulasi.

Di Indonesia banyak pihak khususnya umat Islam salah paham atau gagal paham dalam menilai HTI, kesalahpahaman pertama adalah menilai HTI sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah ormas biasa yang memiliki cita-cita luhur yaitu dengan menegakkan syariat Islam dan kalimat Allah. Padahal, HTI adalah sebuah partai politik yang bertujuan mendirikan sebuah sistem politik pemerintahan global (khusunya di kawasan mayoritas Muslim), yang berbasis pada khilafah yang mereka klaim sebagai alternatif atas sistem demokrasi sekuler dan kapitalisme.[38]

Berbeda dengan ormas yang tidak memiliki tujuan politik praktis, HTI jelas sangat politis dan memang politik yang menjadi tujuan utamanya, yaitu mendirikan negara khilafah. Karena itu, HTI lebih tepat disebut sebagai sebuah parpol dengan menjadikan Islam sebagai alat justifikasi atau legitimasi gerakannya, bukan sebuah ormas "ormas agama" untuk menegakkan syariat Islam misalnya, seperti yang banyak disalahpahami oleh masyarakat.[39]

[38] "Hizbut Tahrir dan Praktik Kekerasan", Http://m.liputan6.com/news/read/2960279/Diakses 17 Januari 2019.
[39] Jamuin, *Infiltrasi Pemikiran*, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS GERAKAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA PERSPEKTIF FILSAFAT NICCOLO MACHIAVELLI

A. Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia Tidak Mempertimbangkan Moralitas Dalam Urusan politik

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan aktifitasnya sedangkan Islam adalah ideologinya. HTI bergerak ditengah- tengah umat dan bersama-sama menjadikan Islam sebagai titik sentralnya. Khilafah dalam sistem HTI adalah sistem pemerintahan dan sistemnya bertentangan dengan pancasila, gerakan khilafah HTI yaitu untuk mengganti sebuah sistem yang telah disepakati oleh pendiri bangsa yang bernama pancasila. Dan itu jelas merupakan sistem yang terlarang. HTI merupakan gerakan transnasional yang memfokuskan pada satu negara yang berdasarkan Islam yang meliputi beberapa bangsa menjadi satu negara yaitu negara Islam, dan itulah yang diperjuangkan oleh mereka dan hal itu sangat berbahaya bagi kita sebagai warga negara Indonesia.

HTI merupakan gerakan politik yang tidak pernah menyerah untuk melakukan gerakan politiknya kepada masyarakat maupun organisasi Islam yang ada di Indonesia. Gerakan yang dilakukan salah satunya adalah lewat penyusupan ke dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Tentu, dengan cara masuk ke dua organisasi tersebut untuk menyebarkan konsep khilafahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktek politiknya, seperti yang telah terjadi, HTI telah mengambil alih kekuasaan masjid yang telah dikelola dan dibangun dengan susah payah oleh warga NU. Masjid yang diambil alih oleh HTI salah satunya adalah masjid an-Nur desa Jatiwates, Tembelang, Jombang. Masjid lain yang dikendalikan oleh HTI dan menjadi ajang cuci otak adalah masjid Babul Jannah yang berada di desa Sengon Jombang. HTI menggunakan masjid itu untuk melakukan kegiatannya seperti menonton video tentang fenomena umat Islam saat ini dan kemudian mengaitkannya dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Kegiatan semacam itu hanya semata-mata untuk kepentingan politik.[1]

Apa yang dilakukan HTI di atas merupakan politik yang tidak mempertimbangkan moralitas dalam berpolitik. kalau kita melihat dalam perspektif Machiavelli, HTI dalam melakukan pengambil alih kekuasaan atas masjid yang berhasil dikuasainya, menurut Machiavelli boleh dilakukan selama tujuan itu bisa tercapai, karena menurut HTI tujuannya merupakan hal yang baik, karena akan menentukan dalam mewujudkan Islam yang lebih maju dan mapan, lebih lanjut Machiavelli mengatakan tujuan yang baik mengijinkan cara-cara yang jahat. Nilai tertinggi bukan individu tapi negara, individu boleh dikorbankan untuk kepentingan politik. Jadi HTI menggunakan individu atau seseorang untuk dijadikan korban politiknya dengan cara mencuci otak korbannya untuk memenuhi keinginan politiknya mendirikan sebuah negara khilafah Islam.

Machiavelli melihat politik dalam realistasnya bahwa politik selalu dipenuhi dengan kebohongan, memfitnah, dan menghasut rakyat demi

[1] Wahid, *Ilusi Negara*, 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya agar tetap langgeng. Kita juga melihat itu pada politiknya HTI dengan mengesampingkan moralitas demi mewujudkan cita-citanya, seperti, HTI melihat politik yang terjadi sekarang ini merupakan politik produk kafir yang sedang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka mengatakan bahwa politik produk kafir tidak akan membawa indonesia pada kemajuan suatu negara. HTI melihat indonesia dalam realitasnya sedang dijajah oleh pihak barat, misalkan mereka melihat Indonesia sedang dicuri kekayaan alamnya seperti PT. Freport yang dikuasai oleh pihak asing, dan respon pemerintah hanya mendiamkannya dan seolah-olah tidak mau tahu.

Dalam hal ini, mereka tidak mempertimbangkan moralitas dalam urusan politik. Mereka selalu menggunakan kata “kafir” untuk merespon isu-isu politik yang terjadi di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan pernyataan mereka yang mengklaim bahwa, HTI dalam menjalankan tugas-tugas politiknya selalu berdasarkan nilai-nilai keislaman. Disini mereka menafikan nilai-nilai keislaman, sehingga mereka menggunakan cara apapun untuk kepentingan politiknya. Sama halnya dengan Machiavelli yang mengesampingkan moralitas dalam urusan politik. Menurutnya negara ltu lebih penting dibandingkan apapun, karena urusan negara itu levelnya adalah paling tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Virtu[2] dan Fortuna[3] Versi Hizbut Tahrir Indonesia

Virtu merupakan kualitas personal yang dibutuhkan oleh seorang raja untuk mengelola negaranya dan meningkatkan kekuasaannya, disini raja harus memiliki kualitas *virtu* yang paling tinggi, bahkan jika dibutuhkan, dapat menggunakan cara kekerasa (sangat jahat). *Virtu* adalah terma kunci dalam konsepsi teori politik Machiavelli. *virtu* difahami sebagai sifat *superior* dalam dunia politik. Kekuatan tersebut bertujuan untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Dalam tubuh HTI, virtu dibisa ditemukan dalam cara memandang peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan. HTI memandang laki-laki sebagai satu-satunya virtu dalam politik, dan bukan perempuan. Perempuan dianggap tidak mampu dan tidak mempunyai hak dalam ruang publik. Perempuan tersebut dianggap sebagi *Fortuna* yang harus ditaklukkan dalam konsepsi teori Machiavelli, Untuk menaklukkan *fortuna* yaitu dengan cara menyiksanya. Jadi perempuan harus ditempatkan di bawah kita, mereka harus dianiaya, ditaklukkan. Dengan kata lain, *fortuna* menuntut respon kekerasan dari mereka yang hendak mengontrolnya.

Jadi *virtu* merupakan kumpulan sumber daya yang dimiliki seseorang, bisa diciptakan, dimobilisasi, dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya selaku aktor politik. Contoh-contoh *virtu*: kepintaran dan keberanian strategis dan taktis, ketelitian, ketegasan, reputasi pemurah hati dan pemaaf, dukungan dari

---

[2] *Virtu* merupakan sifat kelaki-lakian yang melekat pada seorang pemimpin seperti seorang raja dan presiden. Sifat-sifat yang beragam itu tidak hanya mengacu pada sifat baik semata, seperti lemah lembut dan penyanyang, melainkan juga sifat kejam dan keras. R. William Liddle: *Marx atau Machiavelli? Menuju Demokrasi Bermutu di Indonesia dan Amerika* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001), 27.

[3] Machiavelli juga mengibaratkan *fortuna* sesebagai seorang perempuan. Dan ketika kita hendak menguasainya maka kamu harus menyiksanya secara terus menerus. Liddle: *Marx atau*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sendiri, dukungan penguasa negara tetangga, kemampuan memilih pembantu raja dan kemampuan membaca tanda zaman. Juga, tentu saja kelihaian dan kesediaan berdusta dan menggunakan kekerasan secara kejam dan berdarah dingin.

Ketika dalam sebuah acara muktamar PKS, dalam rangka pemilihan calon ketua Muhammadiyah. Terjadi perdebatan antara pemuda-pemuda Muhammadiyah dengan aktivis HTI tentang seorang wanita yang didijadikan calon ketua yang diusung oleh Muhammadiyah. Ketika acara tersebut berlangsung dan seorang wanita menyampaikan pidatonya dihadapan para aktifis HTI, mereka menyorakinya, meneriakkannya seolah-olah mengejek ketidak pantasannya menjadi calon ketua Muhammadiyah. Menurut aktivis HTI, perempuan tidak layak dijadikan seorang pemimpin, karena menurutnya perempuan tidak boleh aktif dalam dunia perpolitikan, tugas seorang perempuan cukup menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak.

Kalau dilihat dari kacamata Machiavelli seorang perempuan diibaratkan *fortuna* yang menjadi objek atas kekerasan *virtu* seseorang. Disini aktifis HTI sebagai *virtu* telah menjatuhkan martabat seorang perempuan sebagai *fortuna* yang dianggapnya tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin, dan hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Islam memandang derajat perempuan dalam dunia sosial dan politik sejajar dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban.[4] Tentu yang dikatakan Machiavelli ini tidak terlepas dari kesetaraan bahwa laki-laki lebih unggul dalam melakukan sesuatu, termasuk untuk menjadi seorang pemimpin.

---

[4] Zainal Abidin, "kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam" *Jurnal Tarbawiyah*, Vol. 12, No. 01 (Juni 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Politik Ketakutan Hizbut Tahrir Indonesia

Politik ketakutan merupakan strategi politik Machiavelli. Konsep ini dioperasikan dengan cara menimbulkan rasa takut kepada masyarakat melalui kekerasan, intimidasi dan ancaman. Menurutnya lebih baik ditakuti daripada dicintai. Puncak ketakutan ini adalah kesetiaan kepada penguasa. Dalam analisis penulis, konsep tersebut bisa ditemukan dalam strategi politik HTI. Organisasi masyarakat keislaman yang terjun ke dalam dunia politik ini melakukan segala cara dalam meraih kekuasaan termasuk politik ketakutan. Berbeda dengan konsep ketakutan Machiavelli, HTI menakut-nakuti masyarakat secara psikis melalui keyakinan keagamaan mereka. Beberapa contoh yang mereka dengungkan ialah bahwa negara Indonesia adalah negara kufur, dan masyarakat yang menolak konsep khilafah yang ditawarkan HTI adalah dosa besar dan dianggap telah melakukan perbuatan maksiat yang paling besar. Stategi ini tidak lain adalah untuk memperoleh dukungan dari penduduk Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena iu, Machiavelli menyimpulkan bahwa ketakutan selalu tepat digunakan, seperti halnya kekerasan yang secara efektif dapat mengontrol legalitas.

Ada perbedaan mendasar epistemologis yang menjadi latar belakang penegakan politik ketakutan antara Machiavelli dan HTI. Machiavelli berangkat dari latar belakang keresahan terhadap sifat manusia secara umum. Menurut Machiavelli manusia pada umumnya tidak tau terima kasih, mencla-mencle, suka menyembunyikan sesuatu, segera ingin melepaskan diri dari bahaya, dan tamak. Maka untuk mengahadapi kondisi manusia semacam itu, lebih baik ditakuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada dicintai, karena seseorang akan patuh hanya karena takut terhadap suatu konsekuensi, baik itu kehilangan kehidupan atau kepemilikan. Sedangkan HTI berangkat dari latar belakang kondisi perpolitikan di Indonesia. Indonesia, menurut HTI memakai sistem negara kufur, dimana individu dalam pemerintahannya selalu terjerat kasus korupsi, nepotisme, penipuan, serta kasus-kasus hukum lain yang menimpanya. Sehingga konsep ini harus dirubah dengan konsep yang ditawarkan HTI, yaitu khilafah.

Contoh lain dari politik ketakutan HTI yang penulis temukan melalui pengalaman pribadi mantan anggota HTI, bahwa ketika terjadi perebutan pengaruh antara aktivis HTI dan jamaah dakwah lain. Mereka kerap menggunakan cara-cara mengancam dengan mengatakan bahwa mereka (jamaah dakwah lain) yang tidak suka atau memusuhi dakwah HTI akan masuk daftar hitam dan akan mendapat hukuman apabila khilafah sudah berdiri.[5] Pernyataan semacam itu secara tidak langsung membuat seseorang merasa takut dan was-was, Sehingga pada akhirnya dapat dengan mudah menguasai. Karena menurut Machiavelli dengan membuat seseorang takut kepada kita maka kita dengan mudah untuk menguasainya dan mengontrolnya. Hal ini dapat menguntungkan kita dalam memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Cara-cara seperti ini memang dianjurkan oleh machiavelli selama masih dalam kepentingan negara untuk menjaga stabilitas politik. Sama halnya dengan HTI, mereka melakukan cara yang sama demi kepentingan tegaknya negara khilafah islamiah.

[5] Al-Amin, *Dilema Konseptual*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh lain di luar gerakan politk HTI bisa dilihat dari pilpres 2019. Jika kita melihat belakangan ini persoalan moral dalam kampanye politik menjadi hal yang saling beririsan, ketika tujuan kekuasaan membenarkan segala cara, maka hoaks, fitnah, dan kebohongan sering kali mendapatkan pembenarannya. Sementara kandidat yang bertarung justru mengkapitalisasi isu moral, mereka tidak ingin disebut Machiavellian, karena istilah tersebut identik dengan hal-hal yang tidak bermoral.

Namun pada praktiknya, mereka justru melakukan cara-cara tersebut. Jokowi misalnya adalah sosok yang berangkat dari status yang disukai oleh masyarakat, namun ia juga semakin tegas dan keras dengan istilah genderuwo dan sontoloyo. sang petahana mengkapitalisasi politik hukum, salah satunya dalam kasus perppu ormas. Menurut penulis hal ini dianggap linear dengan pemikiran Machiavelli dimana tujuan stabilitas kekuasaan berbenturan dengan prinsip kebebasan berserikat dalam demokrasi. Sementara dari pihak oposisi, Prabowo juga sosok yang bercitra kuat, ia menggunakan politik kebocoran kekayaan negara dan kehancuran bangsa sebagai alat politiknya. menurut penulis hal ini sesuai dengan prinsip kekuasaan Machiavelli tentang politik ketakutan. Dan Prabowo menggunakannya untuk meraih dukungan politik. Jika tidak bisa meraih kedua-duanya lebih baik ditakuti dari pada dicintai, demikian kata Machiavelli.

Untuk itulah Machiavelli menyarankan seorang penguasa hendaknya tidak mengutamakan legitimasi moral dan religius, melainkan fokus terhadap kekuasaan stabil menjadi stabil. Dengan itu stabilitas kekuasaan dan politik akan mengarah juga pada stabilitas negara. Stabilitas negara yang baik juga mengarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada stabilitas keadilan dan kesejahteraan.[6] Dalam hal ini, pandangan Machiavelli lebih mengarah pada desakan dan tuntutan situasi genting yang potensial menimbulkan turunnya stabilitas kekuasaan. Untuk itulah, penguasa sedapat mungkin bisa mengamankan kekuasaanya.

[6] Sastrapratedja, *Kata Penganta*, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan data disertai analisis, maka dapat penulis simpulkan terkait dengan topik gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai berikut :

1. Hizbut Tahrir Indonesia dalam gerakan politiknya selalu berupaya menawarkan sistem pemerintahan yang islami yaitu dalam bentuk khilafah Islamiah kepada masyarakat
2. Berdasarkan pendekatan filsafat politik Machiavelli, dapat disimpulkan bahwa dalam gerakan Hizbut Tahrir Indonesia terdapat gerakan yang menyimpang dari agama Islam, seperti halnya mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Seperti halnya mengambil alih kekuasaan, masuk dan bergabung dengan ormas lain untuk menyebarkan pemikirannya, dan menggunakan politik ketakutan. Yang mana dalam pandangan politik Machiavelli seseorang yang ingin mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan yaitu dengan cara menghalalkan segala cara agar kekuasaanya tetap langgeng. Seorang pemimpin tidak harus baik, akan tetapi dia harus berani melakukan kejahatan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tindakan semacam itu dibenarkan karena memiliki tujuan yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan pendekatan filsafat politik Machiavelli. Dengan demikian penelitian ini hanya menjelaskan gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia praktik dalam perspektif filsafat politik Machiavelli. Penulis sadar terdapat berbagai pemaparan serta hasil kajian belum mencapai kesempurnaan. Untuk itu, penulis berharap akan ada penelitian lebih lanjut dan banyak yang menaruh perhatian terhadap fenomena gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia yang terjadi khsusnya di Indonesia, dan mengkaji dengan lebih konprehensif dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya analisis.

1. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah agar dapat melakukan penelitian terhadap gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia dengan kajian yang lebih mendalam.
2. Dalam bidang akademik, agar pihak akademik dapat memperdalam lagi untuk kajian gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia dengan tujuan dapat untuk mempertajam kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan mengungkap gejala atau fenomena yang terkait dengan politik Hizbut Tahrir Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Amin, Ainur Rofiq. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: PT LkiS, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2006.

Amin, Ainur Rofiq. "Kritik Pemikiran Khalifah Hizbut Tahrir yang Autoktatik". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 7, No. 2. Desember 2017.

Amin, Ainur Rofiq. "Dilema Konseptual Khilafah HTI: Sebuah Ketergesaan Kesimpulan". *Bayan*. Vol. 1, No. 3. 2012.

Abidin, Zainal. "Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Tarbiyah*. Vol. 12, No. 1. Juni 2015.

Brown, Alan. *Modern Political Thought*. Middlesex: Penguin Books, 1986.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Hilmy, Masdar. "Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia". *Jurnal Islamica*. Vol. 6, No. 1. September 2011.

Hayati, Nilda. "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living Alquran Perspektif Komunikasi". *Episteme*. Vol. 6, No. 12. Juni 2017.

Hasanuddin. "Strategi Politik Hizbut Tahrir dalam Menegakkan Khilafah Islam di Indonesia". *Al-Fikra*. Vol. 17, No. 1. 2018.

Jamhari, dan Jajang Jahroni. *Gerakan Salafi Gerakan di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Jonkennedi. "Gerakan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia". *Jurnal Komunika*. Vol. 6, No. 1. Juni 2012.

Jamuin, Ma'arif. "Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia". *Suhuf*. Vol. 27, No. 2. November 2015.

Kartawinata, Ali. *Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat Politik al-Mawardi dan Machiavelli*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Liddle, R. William. *Marx atau Machiavelli? Menuju Demokrasi Bermutu di Indonesia dan Amerika*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001.

Machiavelli, Niccolo. *Sang Penguasa*. Terj. C. Woekirsari. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Machiavelli, Niccolo. *The Art of War*. Terj. E. Setiawati Alkhatab. Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002.

Machiavelli, Niccolo. *Politik Kerakyatan Menurut Machiavelli*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1996.

Mayer, Frederick. *Ahistory of Modern Philosophy*. New York: American Book Company, 1951.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.

Manulang, Fernando. "Niccolo Machiavelli: Sang Belis Politik? Suatu Refleksi dan Kritik Filosofis Terhadap Gagasan Politik Machiavelli dalam Il Principe". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 10, No. 4. Desember 2010.

Muhammaddin, "Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Sistem Negara Islam Modern". *Intizar*. Vol. 22, No. 2. 2016.

Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Terj. M Machfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Nashir, Haedar. *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007.

Potingku, Arry. *Metode Penelitian Kualitatif Saja*. Jakarta: Nulisbuku.com, 2016.

Purwadidada, Fajar. *Jaringan Baru Teroris Solo*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

Putra, Galuh Febri. "Everything Is Permitted: Sebuah Ulasan Singkat Il Principe Karya Machiavelli". *Jurnal Poetika*. Vol. 3, No. 1. Juli 2015.

Raziq, Ali Abd. *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: PT Jendela, 2002.

Riyadi, Dedy Slamet. "Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir", Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rafiuddin, Mohammad. “Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir Vis a Vis NU)”. *Islamuna*. Vol. 2, No. 1. Juni 2015.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Samarah, Ihsan. *Biografi Singkat Taqiyuddin Al-Nabhani*. Bogor: Al- Izzah Press, 2002.

Turmudzi, Endang dan Riza Sihabudi. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2006.

Topan, Muhammad. “Kekusaan Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam Tinjauan Etika Politik”. *Jurnal Filsafat*. Vol. 23, No.2. Agustus 2013.

Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institut, 2009.

Wijaya, Daya Negri. “Humanisme Menurut Niccolo Machiavelli”. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran*. Vol. 2, No. 2. Oktober 2017.

Wijaksono, Agung. “Gerakan Politik Hizbut Tahrir di Indonesia Pada Era Pasca Reformasi”. *Jom Fisip*. Vol. 1, No. 2. Oktober 2014.

Zein, Fuad Muhammad. “Kritik Konsep Politik Machiavelli dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan dengan Teori Etika Politik Al-Mawardi)”. *Mahkamah*. Vol. 1, No. 2. Desember 2016.

Majalah dan Internet

“Hizbut Tahrir dan Praktik Kekerasan”, dalam Http://m.liputan6.com/news/read/2960279 Diakses 17/1/2019.

“Khilafah Wajib dan Membawa Rahmat”, dalam Http://hizbut-tahrir.or.id/2014/10/21/ Diakses 6/6/2019.

“Niccolo Machiavelli”, dalam Http://www.biography.com/amp/scholar Diakses 7/1/2020.

“Niccolo Machiavelli”, dalam Http://www.britannica.com/biography Diakses 7/1/2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id